



# LAPORAN KINERJA 2024

**TAHUN ANGGARAN 2024**

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 15 Januari 2025

**Direktur Pemberdayaan Usaha**



**Catur Sarwanto**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2024 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama periode Triwulan IV Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Pemberdayaan Usaha dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Dari 17 indikator kinerja tersebut sebanyak 14 (empat belas) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada Triwulan IV. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-14 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan IV tahun 2024. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 102,28%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 7 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 9 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi, (2) Persentase

peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program, (3) Dokumen peluang investasi yang ready to offer, (4) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, (5) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (6) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (7) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, (8) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha, (9) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 7 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan, (7) Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja Triwulan IV atas 7 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to Offer*, terealisasi 3 peluang investasi *ready to offer* Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor, peluang investasi *ready to offer* di Tual dan Peluang investasi pada Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dari target 3 dokumen atau dengan kata lain tercapai 100%; (2) Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan, teralisasi 3 kegiatan promosi dari target 3 kegiatan atau dengan kata lain tercapai 100%; (3) Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, terealisasi 29 lembaga dari target 29 lembaga atau dengan kata lain tercapai 100%; (4) Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, terealisasi 820 pelaku usaha dari target 820 pelaku usaha atau dengan kata lain tercapai 100%; (5) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha, terealisasi 1660 UMKM dari target 1660 UMKM atau dengan kata lain tercapai 100%; (6) UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha, terealisasi 79 UMKM dari target 79 UMKM atau dengan kata lain tercapai 100%;

Pada Tahun 2024, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar

Rp22.723.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp5.294.362.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp17.429.138,000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp17.287.086.740,- atau setara dengan 76,07% terhadap total pagu anggaran awal atau 99,18% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama Triwulan IV Tahun 2024, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR TABEL** ..... vii

**DAFTAR GAMBAR** ..... ix

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ..... 2

1.3. Tugas dan Fungsi ..... 2

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia ..... 4

1.5. Permasalahan Utama ..... 6

1.6. Sistematika Penyajian ..... 7

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA** ..... 9

2.1. Rencana Strategis ..... 9

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... 16

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 18

3.1. Capaian Kinerja ..... 18

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja ..... 18

3.2.1. Sasaran Strategis 1 ..... 20

Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan ..... 20

3.2.2. Sasaran Strategis 2 ..... 24

Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer* ..... 24

3.2.3. Sasaran Strategis 3 ..... 32

Terlaksananya promosi udaha dan investasi ..... 32

3.2.4. Sasaran Strategis 4 ..... 40

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan ..... 40

3.2.5. Sasaran Strategis 5 ..... 52

Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha .....	52
3.2.6 Sasaran Strategis 6 .....	78
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan .....	78
3.2.7 Sasaran Strategis 7 .....	82
Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha .....	82
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
4.1. Kesimpulan .....	94
4.2. Rekomendasi .....	94
4.3. Tindak Lanjut .....	95

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024 19

Tabel 3. 2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan IV Tahun 2024 .21

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan IV Tahun 2024 .....23

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Tahun 2024 .....25

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP 2024 .....32

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan IV 2024 .....41

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan IV Tahun 2024 .....52

Tabel 3. 8 Pelaksanaan Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di 13 lokasi .55

Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan IV Tahun 2024 .....58

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan IV Tahun 2024.....68

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024.....79

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024.....82

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2024 .....84

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan IV Tahun 2024 .....86

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 .....87

Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024 .....	89
Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024 .....	90
Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024 .....	92
Tabel 3. 19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 .....	93

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Jumlah pegawai berdasarkan Unit Kerja (orang).....4

Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan.....5

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin .....5

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan .....6

Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha.....18

Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi .....22

Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program .....24

Gambar 3. 4 FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan .....27

Gambar 3. 5 Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.....29

Gambar 3. 6 Benchmarking penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (Grand Design Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara .....30

Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi Delegasi D42 ke Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang.....34

Gambar 3. 8 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia .....35

Gambar 3. 9 Audiensi Blended Finance Investment Fund Blue Ocean dengan Seatech Energy .....36

Gambar 3. 10 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara .....38

Gambar 3. 11 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China.....39

Gambar 3. 12 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tanggal 1-3 Oktober Desember 2024 .....43

Gambar 3. 13 Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 16 Oktober 2024 .....44

Gambar 3. 14 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Oktober 2024.....	45
Gambar 3. 15 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tanggal 5 November 2024.....	46
Gambar 3. 16 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 2024.....	47
Gambar 3. 17Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas pada tanggal 12 November 2024.....	48
Gambar 3. 18 Pembahasan Lanjutan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 19 November 2024.....	49
Gambar 3. 19 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17-19 Desember 2024 .	50
Gambar 3. 20 Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2024 ....	51
Gambar 3. 21 temu bisnis inventor MPHPI dengan Investor Potensial dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 .....	54
Gambar 3. 22 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan .....	54
Gambar 3. 23 Kegiatan pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintang .....	55
Gambar 3. 24 Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI .....	56
Gambar 3. 25 pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Makassar .....	57
Gambar 3. 26 Kegiatan pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Semarang.....	58
Gambar 3. 27 Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang .....	66
Gambar 3. 28 Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi.....	67
Gambar 3. 29 Dokumentasi Kegiatan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor.....	70

Gambar 3. 30 Dokumentasi Kegiatan Gerai Pelayanan Perizinan dan promosi investasi, serta pameran Trade Expo Indonesia 2024 di Provinsi Banten .....71

Gambar 3. 31 Dokumentasi Kegiatan Gerai Pelayanan Perizinan pada Workshop Pemberdayaan Usaha di Kabupaten Pasuruan.....72

Gambar 3. 32 Sosialisasi Pengawasan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) .....73

Gambar 3. 33 Kegiatan Verifikasi Penerbitan Sertifikat Standar .....74

Gambar 3. 34 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT Sindabad.....75

Gambar 3. 35 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT. Blue Sea .....76

Gambar 3. 36 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT. Pingroun .....76

Gambar 3. 37 Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di PT BOFI (Blue Ocean Foods Indonesia) Banyuwangi78

Gambar 3. 38 Dashboard IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 .....85

Gambar 3. 39 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada Desember 2024 .....89



# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan IV Tahun 2024.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

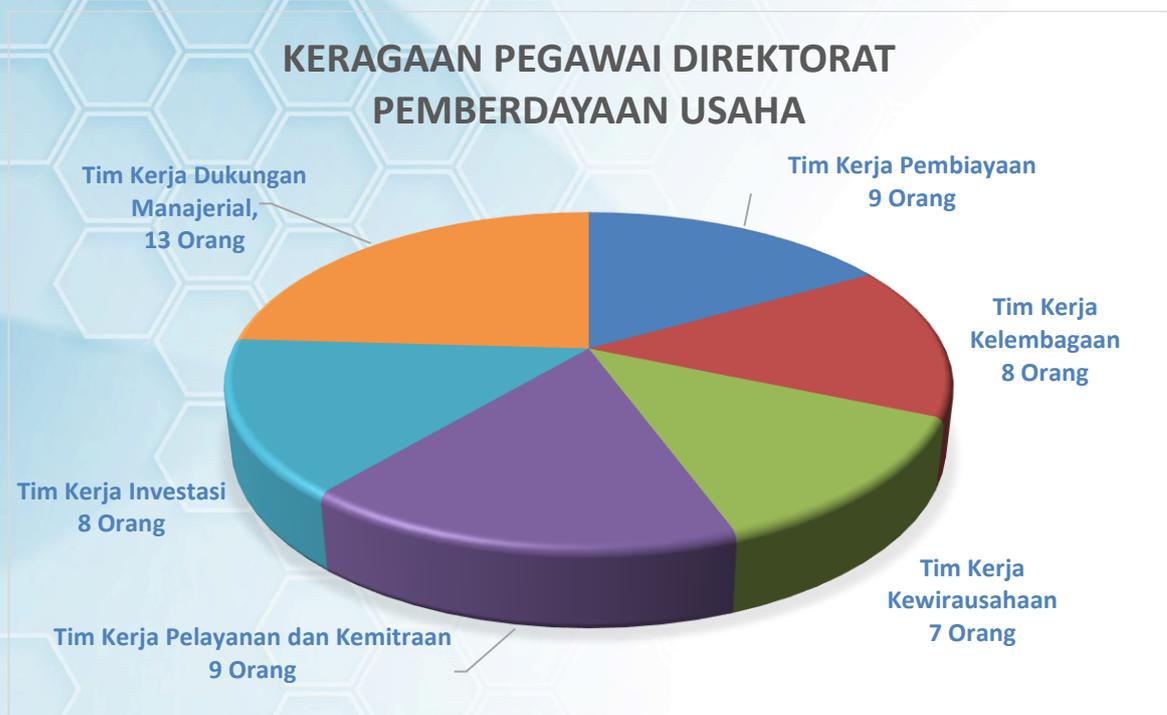
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### 1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

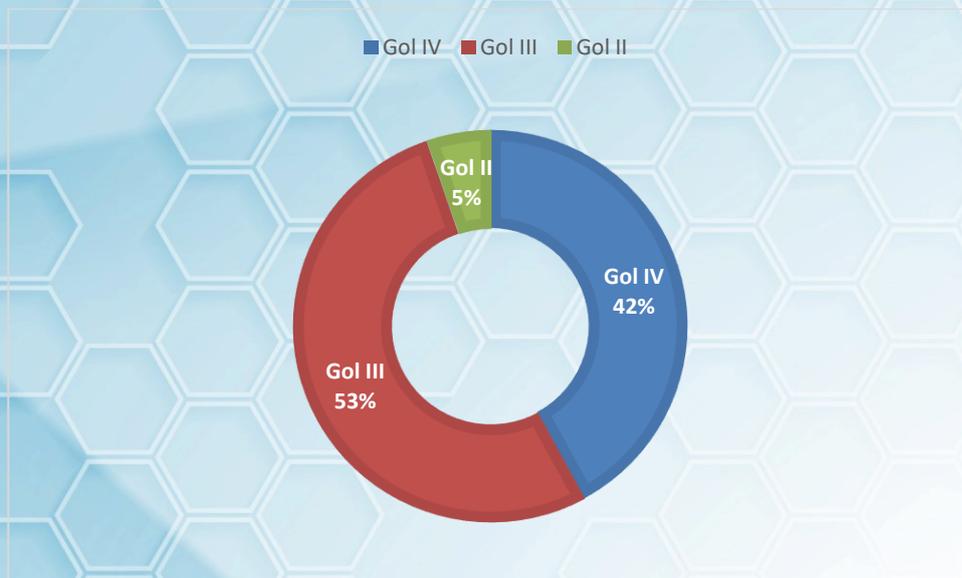
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 berjumlah 54 orang, yang terdiri atas 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang Pegawai Jasa Langsung Perseorangan, yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



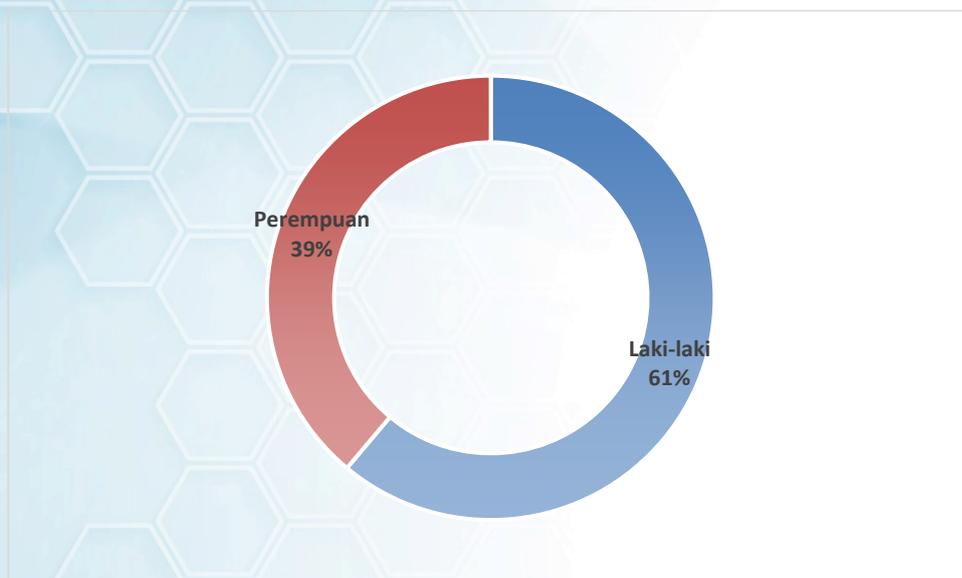
Gambar 1. 1 Jumlah pegawai berdasarkan Unit Kerja (orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III sebanyak 20 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 53%.



Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 22 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 6 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **1.6. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2024, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan IV 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan IV Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan IV Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSKP/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

#### 2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**“terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.**

#### 2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

### 2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2023;
  - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,3 Triliun pada tahun 2023;
  - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
  - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

## 2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

### a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

### b. Sasaran: Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,2 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,4 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 59,0 Kg/Kapita pada tahun 2024.

### c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 104 pada tahun 2021 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

## 3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Terkelolanya Pemerintahan Yang Baik mendukung Penguatan Daya Saing KP

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 87 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 pada tahun 2020 dan level 3,3 pada tahun 2024
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (86,69) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik 93,76 pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar  $< 1\%$  setiap tahunnya pada tahun 2020-2024; pada tahun 2020 dan  $< 0.5\%$  pada tahun 2024
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024. Pada tahun 2020 dan 0,5 pada tahun 2024

### 2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
  - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
  - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
    - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
    - 2) penyusunan profil peluang investasi.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:

- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan kemitraan:
  - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
  - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
  - 3) Pendampingan dan monitoring.
- b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
  - 1) penjaringan calon debitur potensial,
  - 2) peningkatan kelayakan usaha,
  - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,
  - 4) pendampingan manajemen usaha,
  - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
  - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
- c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
  - 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
  - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
  - 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
  - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
  - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
- d. Fasilitasi digitilisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi

produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.

Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:

- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
- 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
- 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
- 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
- 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
- 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
- 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Pemberdayaan Usaha

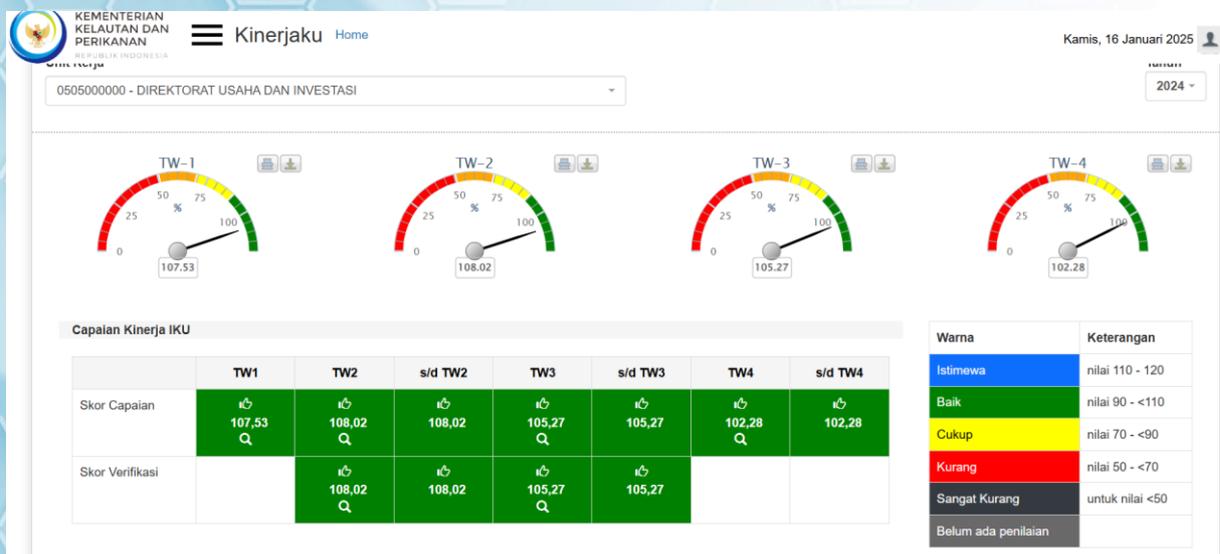
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
		2.	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2.	Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3.	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	3
3.	Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4.	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5.	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	29
5.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6.	Wirusaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	820

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		7.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	1.660
		8.	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	79
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9.	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	10.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		11.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		12.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	84
		13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	100
		14.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	80
		15.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1
		16.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
		17.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	93,75

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 102,28%.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2024 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024, terdiri atas 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2024	TW IV	TW IV	Sd TW IV	% thd Target TW IV	% sd thd Target 2024
1	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5	5	17,71	17,71	354,2	354,2
2	Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8	8	8	8	100	100
3	Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	3	3	3	3	100	100
4	Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3	3	3	3	100	100
5	Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	29	29	29	29	100	100
6	Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	820	820	820	820	100	100
7	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	1.660	1.660	1.660	1.660	100	100
8	UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	79	79	79	79	100	100
9	Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10770	10770	10770	10770	100	100
10	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	75	75,02	75,02	100,03	100,03
11	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	87	92,05	92,05	105,80	105,80
12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	84	84	84,15	84,15	100,18	100,18
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	100	100	100	100	100	100
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	80	80	100	100	120	120

No	Indikator Kinerja (IK)	Target		Realisasi			
		2024	TW IV	TW IV	Sd TW IV	% thd Target TW IV	% sd thd Target 2024
	perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)						
15	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	1	1	1	100	100
16	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94	94	133,3	133,3	120	120
17	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	95	99,36	99,36	104,59	104,59

### 3.2.1. Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan**

#### IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, Penangkapan Ikan Terukur dan program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi sebesar 5% merupakan *outcome* yang harus dicapai oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih jumlah pelaku usaha yang melakukan realisasi investasi pada tahun sebelumnya dengan jumlah

pelaku usaha yang melakukan realisasi investasi pada tahun ini. Perhitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Untuk memenuhi capaian tersebut pada Triwulan IV Tahun 2024 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi. Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, rapat dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Usaha Direktorat Pemberdayaan Usaha. Tujuan dilaksanakannya rapat adalah untuk menghitung capaian indikator jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan. Pada rapat ini, Direktur Usaha dan Investasi menyampaikan arahan dalam rangka percepatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan untuk triwulan selanjutnya dan mengevaluasi kinerja investasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3. 2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	2024*	5	17,71	354,2	5	17,71	354,20
	2023	5	24,45	489,0			
	2022	5	84,3	1.686			
	2021	5	5	100			
	2020	5	13.46	269,2			

\*Angka prognosa

Capaian persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada tahun 2024 **diperkirakan** sebesar 17,71%. Capaian tersebut setara dengan 354,2% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 maupun target RPJMN yaitu sebesar 5%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 24,45% untuk realisasi dan capaian 489% dari target ,maka realisasi Capaian ini mengalami penurunan sebesar 27,57% dari capaian tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2021 yang sebesar 5 dan capaian

100% dari target 5, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 254,20%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 254,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2020 yang sebesar 13,46 dan capaian 269,20% dari target 5, maka realisasi tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 31,58%, sedangkan capaiannya mengalami pertumbuhan sebesar 31,58%.

Pelaku usaha yang merealisasikan investasi pada tahun 2024 diperkirakan berjumlah 1.030 pelaku usaha yang terdiri dari 214 pelaku usaha yang berasal dari PMA dan 816 pelaku usaha yang berasal dari PMDN. Sedangkan pada tahun 2023 pelaku usaha terealisasi sebanyak 875 pelaku usaha yang terdiri dari 184 pelaku usaha yang berasal dari PMA dan 691 pelaku usaha yang berasal dari PMDN.

Dalam rangka penghitungan capaian persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada tahun 2024 telah dilakukan pembahasan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 3. 2 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

## **IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program**

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2024 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2024. Adapun metode penghitungan capaian indikator

kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur kredit program pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 8%.

Tabel 3. 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	2024	8	8	100	8	8	100
	2023	8	9,37	117,12			
	2022	8					
	2021	5	94,16	1883,2			
	2020	5	22,8	450			

Capaian persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada tahun 2024 sebesar 8%, yakni tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 maupun target RPJMN yaitu sebesar 8%. Pelaku usaha yang merealisasikan kredit program pada tahun 2024 berjumlah 2.381 pelaku usaha, mengalami peningkatan sebanyak 176 pelaku usaha. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebanyak 2.205 pelaku usaha.

Jika dibandingkan nilai presentase capaian tahun 2024 dengan capaian 2023 sebesar 9,37% maka mengalami penurunan sebesar 14,63%. Jumlah pelaku usaha yang merealisasikan kredit program pada tahun 2023 berjumlah 2.205 pelaku usaha, mengalami peningkatan sebanyak 189 pelaku usaha dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebanyak 2.016 pelaku usaha.

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2021 yang sebesar 94,16 dan capaian 1883,2 dari target 5, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 91,50%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar 94,69%. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2020 yang sebesar 22,88 dan capaian

457,60% dari target 5, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 65,03%, sedangkan capaiannya mengalami penurunan sebesar 78,15%.

Dalam rangka penghitungan capaian persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada tahun 2024 telah dilakukan pembahasan yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 3. 3 Pertemuan penghitungan persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program

### **3.2.2. Sasaran Strategis 2**

#### **Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer***

#### **IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer***

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan pembahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan.

Tabel 3. 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Peluang investasi Yang Ready to Offer Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN	Realisasi Th 2024*	Persentase Realisasi Th 2024 terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)	2024	3	3	100	3	3	100
	2023	3	3	100			
	2022						
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja dokumen peluang investasi yang *ready to offer* pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) dokumen, yakni tercapai 100% terhadap target tahunan maupun target RPJMN, sehingga tidak terdapat peningkatan maupun penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun Capaian tiga dokumen Peluang investasi yang *ready to offer* tersebut yaitu:

1. Peluang investasi *ready to offer* Komoditas Tuna di Kabupaten Biak Numfor
2. Peluang investasi *ready to offer* Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual
3. Peluang investasi pada Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

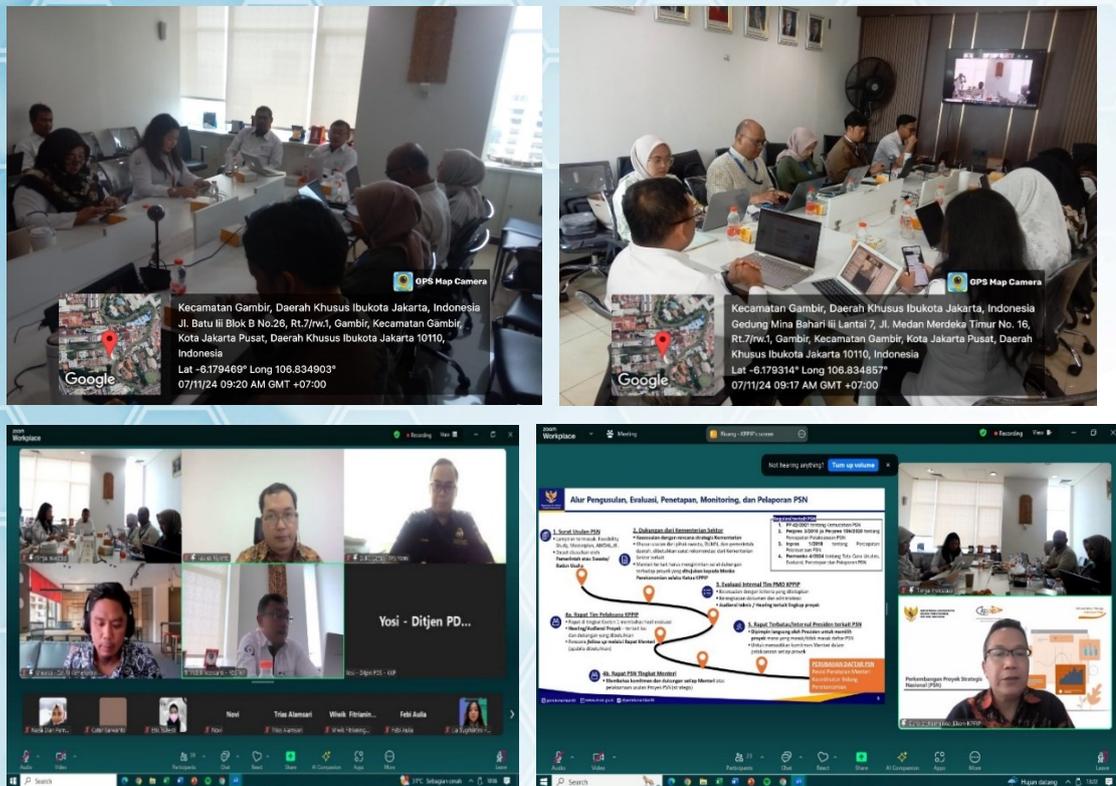
Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peluang investasi yang *ready to offer* pada triwulan IV tahun 2024 antara lain:

1. FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan
  - Kegiatan FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 November 2024 secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha, Gedung Mina Bahari III, Lt. 12; dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting;
  - Tujuan FGD adalah untuk memperkaya pengetahuan dan informasi terkait pengembangan kawasan usaha yang terintegrasi dan terpadu; mengetahui keunggulan fiskal dan nonfiskal dari pengembangan dan pengelolaan kawasan usaha melalui skema Kawasan Industri (KI), Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta mengetahui mekanisme pengusulan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kawasan usaha;

- Narasumber yang hadir dalam FGD ini yaitu Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan sekaligus selaku Plt. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi - Kemenko Perekonomian; Analis Kebijakan, Dit. Perwilayahan Industri – Kemenperin; Kepala Seksi Kawasan Berikat, Dit. Fasilitas Kepabebean – Kementerian Keuangan; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- Hasil diskusi dan pembahasan antara lain: (a) Konsep pengembangan Kawasan Hilirisasi KP. Kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pengembangan kawasan hilirisasi ini adalah masalah status lahan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, diharapkan program Kawasan Hilirisasi KP diusulkan untuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga kedua kendala tersebut dapat diminimalisir/dicegah; (b) Urutan konsep pengembangan kawasan usaha dari yang terkecil hingga terbesar yaitu Kawasan Berikat → Kawasan Industri → Kawasan Ekonomi Khusus. Penetapan KEK di setiap lokasi dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP); (c) Perusahaan-perusahaan yang berada di dalam KI dan KEK bisa menggunakan fasilitas kawasan berikat; (e) Pengembangan KEK merupakan program ultimate, sehingga dalam wilayah KEK juga sudah termasuk fasilitasi Kawasan Industri dan Kawasan Berikat; (f) Perbedaan utama Kawasan Berikat dengan kawasan yang lain yaitu kawasan ini diusulkan atas nama perusahaan tertentu, bukan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; (g) Saat ini seluruh program pengembangan KEK adalah berstatus PSN; (h) PSN dapat menapis peruntukan lahan meskipun tidak sesuai RTRW yang berlaku dalam suatu daerah. Surat rekomendasi penapisan (RKPPPR) tersebut dapat dimintakan kepada Kementerian ATR/BPN; (i) Kegiatan pengadaan lahan untuk PSN sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan APBN. Saat ini Kemenko Perekonomian lebih merekomendasikan lahan calon PSN milik swasta atau milik Pemda, baik dengan status hak milik maupun sewa lahan jangka panjang; (j) Penetapan PSN akan dilegalisasi melalui Permenko Perekonomian; (k) Dalam pengembangan KI harus dialokasi lahan untuk IKM yaitu sebesar 10% dari total luas kawasan; (l) KEK eksisting untuk bidang perikanan dinilai belum berjalan

optimal, yaitu: Bitung, Morotai, dan Sorong; (m) Pengusulan dan proses pembangan KI dan KEK dibutuhkan waktu sekitar 2 – 5 tahun

- Dokumentasi



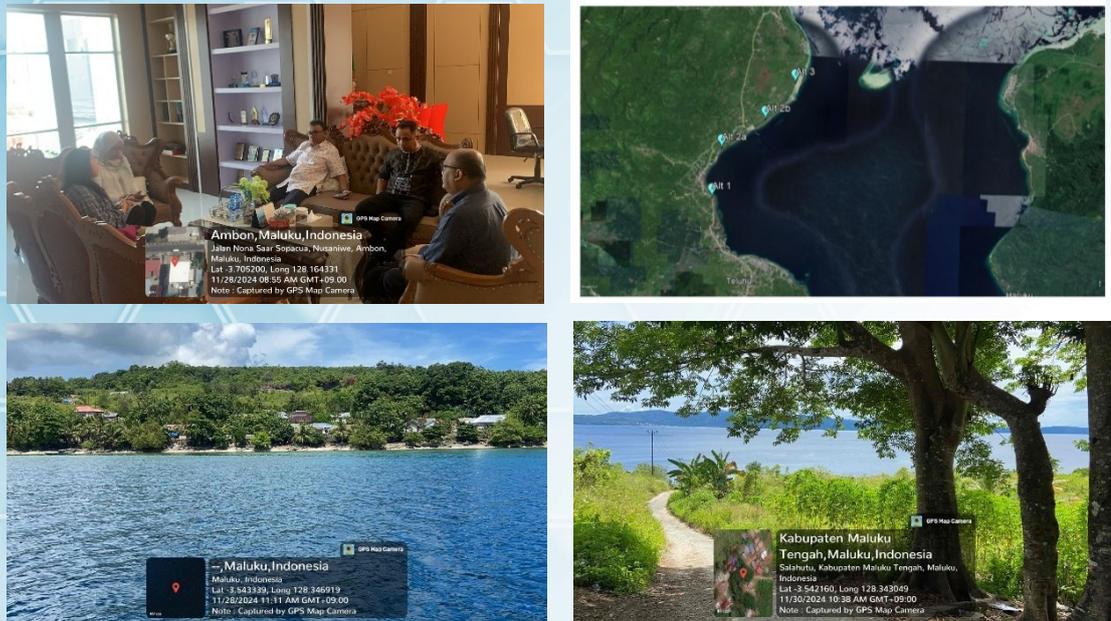
Gambar 3. 4 FGD Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

## 2. Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku

- Kegiatan pemetaan calon lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 27 November – 1 Desember 2024 melalui koordinasi ke beberapa instansi dan stakeholder terkait di provinsi Maluku yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Eri, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, PT Aneka Sumber Tata Bahari, dan PT Pedulu Laut Maluku. Kunjungan ke instansi dan stakeholder terkait bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan; pemetaan potensi lahan yang siap dijadikan Kawasan; peluang pengembangan kawasan hilirisasi pada wilayah tersebut, serta mengidentifikasi respon Pemda dan Pelaku Usaha terhadap rencana Pengembangan Kawasan Hilirisasi.

- Pemerintah Provinsi Maluku menawarkan lokasi di Desa Waai Kabupaten Maluku Tengah yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan Pelabuhan Ambon Baru. Sudah ada dokumen Studi Kelayakan (FS) yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Maluku, KKP dan Pelindo terkait rencana pengembangan Pelabuhan Ambon Baru yang dapat dijadikan bahan kajian yang mendukung grand design kawasan hilirisasi. Pemprov siap mendukung pengembangan kawasan hilirisasi di Kota Ambon sebagai tempat lokasi industri terpadu sektor kelautan dan perikanan. Pemda Provinsi Maluku bersedia menyampaikan dukungan berupa pengalihan status kepemilikan lahan calon lokasi Kawasan Hilirisasi kepada KKP;
- Hasil pemetaan calon lokasi Kawasan Hilirisasi KP di Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku sebagai berikut:
  - a. Lokasi Alternatif 1 Dusun Naang, Desa Waai, berdekatan dengan Pelabuhan Tulehu Eksisting. Akses jalan eksternal merupakan jalan kabupaten, aspal, lebar 6 meter. Nilai bobot penilaian 78,25
  - b. Lokasi Alternatif 2A Dusun Ujung Batu, Desa Waai, Teluk Tulehu, sebelah barat PLTU Waai. Akses jalan eksternal merupakan jalan nasional, aspal, lebar 6 meter dan akses jalan internal merupakan jalan kabupaten, aspal, lebar 6 meter. Nilai bobot penilaian 81,40. Kondisi eksisting berupa vegetasi dan permukiman, kondisi topografi dengan kelerengan cukup curam.
  - c. Lokasi Alternatif 2B Dusun Ujung Batu, Desa Waai, sebelah utara Teluk Tulehu. Akses jalan eksternal merupakan jalan nasional, aspal, lebar 6 meter dan akses jalan internal merupakan jalan permukiman, beton, lebar 2,5 meter. Nilai bobot penilaian 80,00. Kondisi eksisting berupa vegetasi dan permukiman, kondisi topografi dengan kelerengan cukup curam dengan karakteristik berundak/trap
  - d. Lokasi Alternatif 3 Dusun Batu Dua, Desa Waai, sebelah timur PLTU Waai. Akses jalan eksternal merupakan jalan nasional, aspal, lebar 6 meter dan belum terdapat aksesibilitas jalan internal. Nilai bobot penilaian 70,80
- Rekomendasi tindak lanjut antara lain (a) Nilai pembobotan hasil FS rencana pengembangan Pelabuhan Ambon Baru untuk lokasi alternatif 2A dan 2B memiliki bobot paling tinggi dengan nilai 81,4 dan 80 yang artinya lokasi tersebut layak; (b) Pemda Maluku mengarahkan ke lokasi alternatif 2B, lokasi masih lahan

kosong tidak banyak pemukiman; (c) Lokasi alternatif 2A berdampingan dengan pelabuhan penyeberangan Waai, akses lebih dekat ke jalan nasional; (d) Kedua lokasi memiliki fasilitas kesehatan pembantu, pendidikan SD dan SMP, peribadatan, kegiatan kepelabuhanan di wilayah Teluk Tulehu, jaringan listrik dan air.



Gambar 3. 5 Pemetaan Calon Lokasi Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan di Kota Ambon, Provinsi Maluku

### 3. *Bench marking* penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (Grand Design Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara

- Kegiatan pendampingan atau *bench marking* penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (Grand Design Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 November 2024. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu mengetahui kondisi perkembangan usaha perikanan; mempelajari rantai pasok industri perikanan dari hulu ke hilir; benchmarking pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan memperoleh masukan tentang konsep Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan;
- Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu produsen ikan tuna terbesar se-Indonesia. Terletak diantara WPP 715 dan 716, provinsi ini memiliki lokasi penangkapan (*fishing ground*) yang cukup luas dan merupakan jalur ikan tuna dewasa. Di wilayah provinsi ini, Kota Bitung adalah daerah yang didorong untuk

pengembangan industri perikanan, terutama untuk komoditas tuna. Terdapat 2 (dua) kawasan utama dalam pengembangan industri perikanan, yaitu : Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.;

- PPS Bitung adalah lokasi yang paling strategis untuk pengembangan UPI tuna, tetapi ketersediaan lahan sudah penuh. Rencana penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur secara penuh kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi operasional kapal dari Bitung karena posisi PPS ada di Zona 3 sedangkan *fishing ground* mereka sebagian besar ada di Zona 2;
- Pengelola KEK Bitung (PT. Membangun Sulut Hebat) merupakan BUMD yang karyawannya sudah purnatugas sebagai ASN daerah. KEK Bitung diresmikan pada Tahun 2019 yang berada di 3 kelurahan yang masuk dalam batas administrasi Kota Bitung. Kawasan lahan yang dimiliki oleh Pemprov Sulut seluas 92,79 Ha dalam KEK belum terkelola terutama pada pembangunan infrastruktur, jalan, dan juga fasilitas umum lainnya. Di luar kawasan inti KEK Bitung terdapat lahan 441,21 Ha yang telah dimiliki oleh pelaku usaha selaku tenat dari KEK Bitung;



Gambar 3. 6 Benchmarking penyusunan peluang investasi kelautan dan perikanan (Grand Design Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan) di Provinsi Sulawesi Utara

#### 4. Rapat Koordinasi dan Finalisasi Penyusunan Konsep *Grand Design* Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 16 Desember 2024 di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III, Lt. 14. Rapat ini bertujuan untuk penyampaian dan finalisasi konsep Kawasan Hilirisasi KP, serta pembahasan hasil *benchmarking* dan pemetaan calon lokasi Kawasan Hilirisasi KP. Rapat dipimpin oleh Dirjen PDSPKP dan dihadiri oleh Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi

Manusia KP, BPPSDM KP; Direktur Pemberdayaan Usaha, Sesditjen PDSPKP, Tim Urban and Regional Development Institute (URDI); dan PT. Nusantara Urbana Advisori, serta pegawai lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha;

- Hasil diskusi dan pembahasan sebagai berikut:
  - Pemetaan dan Pra FS dilakukan sebelum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pra-FS lebih detail dibandingkan dengan pemetaan lokasi. Perlu ditambahkan tahapan perencanaan dengan lebih detail seperti FS, masterplan, dan DED;
  - Kemungkinan dapat dilakukan kerja sama antara BLU dengan swasta, terutama untuk menutupi keterbatasan modal/anggaran pembangunan;
  - Perlu dilengkapi rincian intervensi untuk membuat kawasan layak, seperti meningkatkan produksi tuna, ada kawasan clear & clean, dan akses transportasi;
  - Perlu dipertimbangkan potensi penangkapan atau sumber daya ikan tuna di Zona 3. Hasil penapisan 4 adalah Skor 5 untuk Kota Ambon dan Skor 4 untuk Bitung dan Kota Kendari, sedangkan skor 3 (tidak lolos penapisan) untuk Halmahera Tengah, Kota Sorong, Minahasa Utara, Sorong, dan Morowali;
  - Kualitas tuna dari WPP 714 lebih baik karena kandungan unsur hara perairannya yang lebih kaya sehingga kualitas ikan tuna yang dihasilkan lebih baik. Sebagai perbandingan yaitu WPP 717 yang memiliki wilayah laut berlumpur yang menghasilkan kualitas daging tuna dengan kualitas yang lebih rendah;
  - Salah satu resiko pengembangan industri di Ambon adalah tidak akan dibuka pintu ekspor langsung dari Ambon;
  - Calon investor yang berminat ke Sorong akan melakukan kajian FS dan akan difasilitasi dengan Eselon I lingkup KKP

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp545.951.874,- atau setara dengan 48,44% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari 48,44% anggaran yang telah terealisasi, telah dicapai realisasi indikator kinerja sebesar 50%.

### 3.2.3 Sasaran Strategis 3

#### Terlaksananya promosi usaha dan investasi

#### IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor.

Tabel 3. 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN	Realisasi 2024*	Persentase Realisasi 2024 terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Promosi Usaha dan Investasi KP (Promosi)	2024*	3	3	100	3	3	100
	2023	2	2	100			
	2022	3	3	100			
	2021						
	2020						

Capaian indikator kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Tahun 2024 pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) promosi. Capaian tahun 2024 setara dengan dengan 100% terhadap target tahunan dan target RPJMN sebanyak 3 (tiga) promosi. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 2 dan capaian 100% dari target 2, maka realisasi tahun 2024 tidak mengalami pertumbuhan atau penurunan . Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun 2022, yang sebesar 3 dan capaian 100% dari target 3, maka realisasi 2024 sama dengan tahun 2022. Capaian 3 (tiga) penyelenggaraan Promosi Usaha dan Investasi KP Tahun 2024 tersebut yaitu:

1. *Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF)* tanggal 29 April 2024 di Jakarta .
2. *Indonesia Marine & Fisheries Business Forum (IMFBF)* tanggal 5 Februari 2024 di Jakarta.
3. *Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF)* tanggal 25 Juni 2024 di Surabaya.

Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Minat Investasi D42 – Uni Emirat Arab

- Pendampingan Investasi Delegasi D42 melakukan kunjungan ke Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang pada tanggal 15 November 2024 dihadiri oleh CEO dan Dewan Direksi D42 bersama tim KKP antara lain Ketua Tim Kerja Investasi Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Ketua Tim Kerja Pengadaan Prasarana BLUPPB Karawang DJPB, Ketua Tim Kerja Pakan Buatan Direktorat Ikan Air Tawar dan Tim Kerjasama DJPB;
- D42 adalah investor yang bergerak di bidang pertanian, logistik, trading dan ritel yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Di bidang trading, D42 fokus pada industri Barang Konsumsi Cepat Saji (Fast-Moving Consumer Goods/FMCG) premium dengan membangun ekosistem perdagangan mulai dari pengadaan bahan baku, logistik dan penyimpanan. D42 berminat untuk berinvestasi di bidang usaha budi daya nila salin dan pembangunan gudang beku di Karawang;
- Tim BLUPPB Karawang menyampaikan potensi investasi beserta perhitungan ekonomi dan bisnis, studi kelayakan serta sistem pengelolaan yang ditawarkan yaitu (a) luas lahan BLUPPB adalah 400 ha, saat ini lahan yang telah dikembangkan untuk BINS sebesar 80 ha; (b) hasil produksi sampai dengan September 2024 sebesar 881 ton senilai Rp18,1 M dengan harga rata-rata ikan nila fillet Rp26.000/kg; (c) nilai investasi 80 ha budidaya nila salin sebesar Rp58,6 M dengan hasil analisis finansial IRR 16%, NPV Rp 68.387.456,- dan payback periode selama 3 tahun 7 bulan; (d) sistem pengelolaan yang ditawarkan melalui mekanisme Kerjasama Manajerial (KSM) yaitu pendayagunaan aset dan management BLUPPB; (e) Saat ini, hasil budidaya nila salin di Karawang diserap oleh PT. Suri Tani Pemuka dan e-fishery untuk pasar

ekspor, PT. Sily Fish (Gastronomi) serta beberapa perusahaan di wilayah Gresik dan Surabaya untuk pasar lokal dalam skema jual putus, bukan suatu kemitraan;

- D42 menilai bahwa bisnis budidaya nila salin tersebut sangat bagus, dan menjajaki apakah asset tersebut dapat dibeli oleh D42. Tim D42 saat ini sedang melakukan diskusi internal dan akan berkoordinasi dengan KKP lebih lanjut. Tindak lanjut adalah Ditjen PDSPKP bersama dengan Ditjen Budi Daya akan melakukan pendampingan dan koordinasi lebih lanjut untuk dapat merealisasikan minat investasi D42;



Gambar 3. 7 Pendampingan Investasi Delegasi D42 ke Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang

## 2. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia

- Rapat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 secara hybrid, yaitu luring di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha dan daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui profil Maritimpreneur/Maritim Muda sebagai perwakilan PT. Nusantara Energy Indonesia dan pembahasan minat investasi komoditas tuna di Bitung;
- PT. Nusantara Energy Indonesia adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah berdiri sejak tahun 2012, bergerak dalam bidang jasa pertambangan, *bulk sea transportation*, konstruksi, energi terbarukan, dan dukungan tenaga ahli. PT Nusantara Energy Indonesia menunjuk Maritimpreneur/Maritim Muda sebagai konsultan untuk pengembangan investasi. PT. Nusantara Energy Indonesia berminat untuk berinvestasi untuk memperluas bidang usahanya di sektor kelautan dan perikanan pada usaha penangkapan ikan tuna, pengolahan, dan pembangunan galangan kapal di Kota Bitung. Rencana nilai investasi awal yang akan dilakukan untuk pengadaan kapal penangkapan ikan tuna yaitu Rp5 Milyar. Target pasar yang akan dipenuhi yaitu pasar ekspor ke Jepang;

- Tim KKP menyampaikan peluang investasi komoditas tuna di Kab. Biak Numfor, dengan nilai potensi investasi mencapai Rp190,20 Milyar, dimana nilai tersebut sudah termasuk dengan biaya operasional di tahun pertama sebesar Rp121,69 Milyar. PT. Nusantara Energy Indonesia berminat untuk mempelajari dokumen peluang investasi komoditas tuna di Biak Numfor;
- Rekomendasi tindak lanjut
  - a. Direktorat Pemberdayaan Usaha akan menyampaikan dokumen-dokumen peluang investasi sektor kelautan dan perikanan, antara lain di Biak Numfor, Maluku Tengah, Wakatobi dan Kebumen;
  - b. PT. Nusantara Energy Indonesia akan segera menghubungi KKP apabila telah ada keputusan dari manajemen perusahaan untuk berinvestasi terkait lokasi dan jenis usaha



Gambar 3. 8 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Nusantara Energy Indonesia

### 3. Audiensi *Blended Finance Investment Fund Blue Ocean* dengan *Seatech Energy*

- Rapat Audiensi dilaksanakan pada 2 Desember 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh Owner dan tim *Seatech Energy*. Adapun perwakilan KKP yang hadir yakni Direktur Pemberdayaan Usaha, Perwakilan Biro Perencanaan, Perwakilan Direktorat Rumput Laut, Perwakilan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perwakilan Seditjen PDSPKP. Tujuan audiensi adalah pembahasan usulan *Blended Finance Investment Fund Blue Ocean* yang diusulkan *Seatech Energy* kepada KKP;
- *Seatech Energy* adalah sebuah perusahaan Belanda bergerak di bidang budidaya rumput laut dengan pemanfaatan teknologi di Jakarta. Kegiatan yang dilakukan fokus pada energi terbarukan untuk mendukung penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan dan melindungi ekosistem laut;

- Sasaran dari *Seatech Energy* ini adalah pembudidaya rumput laut skala kecil yang akan diberikan pelatihan untuk penguatan kelembagaan dan cara peningkatan produksi. Hasil produksi diharapkan memenuhi target baik jumlah, kualitas dan standar keamanan yang dipersyaratkan. *Seatech* menggunakan desain teknologi yang disebut ORCA-SP™ dan Anaerobic Sequential *Up-flow Reactor* (ASUR™). *Seatech Energy* sedang mengembangkan beberapa budidaya untuk spesies rumput laut berbeda yang akan dimanfaatkan untuk alternatif protein nabati, pakan ternak, serat, hidrokoloid, dan bioplastik. Selain itu juga berencana membudidayakan rumput laut di lepas pantai dalam skala industri untuk mengubah limbah rumput menjadi biogas untuk menghasilkan sumber energi;
- Tim *Seatech Energy* akan melakukan identifikasi lokasi budidaya rumput laut skala kecil dan masih tradisional serta menjajaki modeling pengembangan rumput laut di lokasi modeling Wakatobi, Maluku Tenggara dan Rote Ndao dan akan berkoordinasi dengan KKP lebih lanjut;
- Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Ditjen PDSPKP dan Ditjen Budidaya bersama akan melakukan pendampingan dan koordinasi lebih lanjut untuk pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia;



Gambar 3. 9 Audiensi Blended Finance Investment Fund Blue Ocean dengan *Seatech Energy*

#### 4. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara

- Rapat Audiensi dan Pendampingan Investasi dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2024 secara di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III, Lt. 14. Agenda rapat ini yaitu penyampaian profil singkat PT. Industri Laut Nusantara serta pembahasan minat investasi sektor kelautan dan perikanan. Rapat ini dibuka oleh Dirjen PDSPKP, dan diikuti oleh Direktur Pemberdayaan Usaha,

- Direktur Pemasaran, Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan, direksi PT. Industri Laut Nusantara, serta pegawai lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- PT. Industri Laut Nusantara (ILN) adalah perusahaan PMA hasil joint venture PT. Saga Multi Investama (Indonesia) dan Green Energy Investment Consulting Ltd (perusahaan China yang telah berkecimpung di bidang tambang dan pengolahan nikel di Morowali). PT. ILN akan berinvestasi dimulai dari USD 10 M, dan investasi modal bergulir mencapai USD 50 M pada tahun ke-20. Green Energy Investment Consulting Ltd telah melakukan pertemuan calon investor di China untuk mengundang dan menyaring agar berinvestasi ke Indonesia, dimana lokasi pilot projectnya yaitu di Kota Sorong;
  - Perusahaan ini rencananya akan bergerak di bidang: penangkapan ikan, pengolahan ikan kaleng, pengolahan rumput laut, dan dimungkinkan untuk merambah ke bidang usaha lainnya. Rencana Lokasi pengembangan rumput laut adalah di Ujung Pandang, Ambon, Kupang dan Kendari. Jenis ikan yang ditargetkan untuk usaha penangkapan pengolahan ikan yaitu: udang, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, dan tilapia, dimana wilayah pertama yang akan dikembangkan adalah Sorong. Proporsi awal yaitu penangkapan 40% dan budidaya 60%;
  - Ditjen PDS akan menyampaikan data eksisting daya dukung (misalnya sumber air tawar, listrik, dan lahan) dan potensi sektor kelautan dan perikanan di Kota Sorong, termasuk profil dari Zona 3;
  - Saran dan rekomendasi indak lanjut yaitu (a) Ditjen PDS akan mengawal realisasi investasi, mulai dari pendampingan FS, fasilitasi perizinan usaha, koordinasi ke daerah, hingga pendampingan realisasi investasi; (b) Profil Zona 3 akan segera disampaikan kepada Tim Kajian dari PT. ILN; (c) Perlu dikaji lebih lanjut terkait program pemberdayaan masyarakat setempat dan peluang investasi untuk ikan hias dan budidaya kerapu; (d) Perlu dilakukan rasionalisasi target produksi perikanan tangkap PT. ILN karena potensi Zona 3 hanya sekitar 1,8 juta ton/tahun.



Gambar 3. 10 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT Industri Laut Nusantara

#### 5. Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China

- Pendampingan investasi untuk Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong ke *Fishing Port* Samudera Nizam Zahcman dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024. Delegasi Enterprise adalah himpunan dari beberapa pengusaha skala besar besar di China yang bergerak antara lain di sektor perikanan, industri kreatif, pertanian. Kunjungan Delegasi Enterprise bertujuan untuk peninjauan peluang kerja sama investasi, peninjauan kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan eksisting, serta mengetahui gambaran umum. Pada tahap awal Delegasi Enterprise siap menghadirkan 200 kapal penangkap ikan yang akan diimpor dari China;
- Apabila legasi Enterprise dari Provinsi Guangdong ingin berinvestasi di Indonesia, maka harus mengikuti ketentuan *Technical Cooperation Guidelines* dari isi kerja sama bilateral Indonesia-China, yang telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Pimpinan *Ministry of Agriculture and Rural Affair (MARA)* – RRT. Prinsip dan prosedur dari kerja sama tersebut harus dipatuhi. Demikian juga ketentuan Operasional Kapal Perikanan, seperti : kepemilikan kapal oleh perusahaan patungan dan terdaftar sebagai kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang telah dihapus dari Tiongkok; kapal berukuran minimal 150GT s.d 300GT untuk wilayah ZEE (kecuali WPPNRI 718) dan laut lepas di wilayah RFMOs, berukuran minimal 150GT s.d 400GT untuk wilayah ZEE pada zona 3 (WPPNRI 718), berukuran di atas 300GT untuk wilayah ZEE pada zona 4 (WPPNRI 572 dan 573) pada batas di atas 150 mil laut dari garis pantai dan laut lepas di wilayah RFMOs; serta Kapal penangkap ikan

wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan di WPPNRI. Setelah mendarat, hasil tangkapan tersebut wajib dilakukan kegiatan, antara lain penanganan, pengolahan, dan pengemasan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia;

- Rekomendasi dan tindak lanjut: Delegasi Enterprise perlu memperoleh rekomendasi dari MARA apabila akan berinvestasi di Indonesia; kapal yang akan diimpor Delegasi Enterprise pada tahap awal harus berbendera Indonesia dan dimiliki oleh perusahaan *join venture*; serta untuk rencana investasi selanjutnya, KKP siap untuk mendampingi dan memfasilitasi lebih lanjut



Gambar 3. 11 Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi Delegasi Enterprise dari Provinsi Guangdong, China

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp2.030.042.360,- atau setara dengan 89,96% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,-. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 89,96%, hal ini dikarenakan penyesuaian target indikator kinerja utama akibat adanya *automatic adjustment* masih dalam tahap pengusulan kepada Sesditjen PDSPPK.

### **3.2.4 Sasaran Strategis 4**

**Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan**

#### **IK5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)**

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen PDSPKP adalah ~~menindaklanjutinya~~ dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM. Perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada Indikator kinerja ini yang dimaksud Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya adalah Lembaga usaha yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena

mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, kluster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

Tabel 3. 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan IV 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	2024*	29	29	100	29	29	100
	2023	22	22	100			
	2022	30	30	100			
	2021						
	2020						

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan tahun 2024 merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Pada awal perencanaan tahun 2024, target capaian ditetapkan sebanyak 45 lembaga. Namun, selama pelaksanaan kegiatan, terjadi penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment*. Penyesuaian ini berdampak pada pengurangan alokasi anggaran kegiatan, sehingga target capaian perlu disesuaikan menjadi 29 lembaga. Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan IV tahun 2024 telah mencapai 3 lembaga usaha dan secara akumulasi realisasi indikator kinerja kelembagaan adalah 29 lembaga usaha atau telah mencapai 100% dari target.

Capaian indikator Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya) pada tahun 2024 adalah sebesar 29, atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024 sebesar 29 lembaga. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 22 lembaga atau setara 100% dari target 22, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 31,81%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 30 atau setara 100% dari target 30, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan capaian sebesar 3,33%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 29 setara dengan 59,18% 64.4% dari target RPJMN sebesar 45, hal ini disebabkan karena adanya

penyesuaian anggaran melalui mekanisme *automatic adjustment* sebesar Rp611.336.000,-.Perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun 2022

Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pada Triwulan IV, antara lain:

1. Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tanggal 1-3 Oktober Desember 2024

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 1-3 Oktober 2024 di Kota Semarang dengan dihadiri oleh 13 koperasi, 5 koperasi kalamo, 2 umkm naik kelas dan 2 inkubasi bisnis. Kegiatan juga dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan bimtek bekerja sama dengan PT. Breto Inovasi Indonesia sebagai narasumber/pelatih.

- Acara dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha yang diawali dengan sambutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan oleh kegiatan inti pelatihan
- Materi yang diberikan adalah sebagai berikut : 1) Membangun Komitmen dalam menjalankan Manajemen Usaha "Leadership"; 2) Pemahaman Dasar Perkoperasian; 3) Tata Kelola Organisasi Koperasi; 4) Teori Dasar Pencatatan dan Penyusunan laporan Keuangan Koperasi; dan 5) Pengembangan Inovasi Bisnis Koperasi
- Peserta mendapat 2 jenis sertifikat yaitu sertifikat kehadiran untuk seluruh peserta dan sertifikat kelulusan bagi peserta yang mendapat nilai minimal 70 untuk pos test. Dari 34 peserta, 26 orang peserta dinyatakan lulus (76,47%)



Gambar 3. 12 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tanggal 1-3 Oktober Desember 2024

2. Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 16 Oktober 2024

Dalam rangka mendukung kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan, telah diadakan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan/atau Pemasaran Ikan, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan USAID Ber-IKAN, PT Breto Inovasi Indonesia, Perwakilan Tim Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan Pelaksana Tim Kerja Kelembagaan-Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- Hasil penyusunan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan/atau Pemasaran Ikan sebagai Berikut : 1) Penilaian calon lembaga usaha dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria; 2) Metode penilaian kelayakan ditentukan berdasarkan Nilai Total (NT) dengan menjumlahkan hasil perkalian Nilai Bobot (NB) dengan Nilai Skor (NS) dari setiap aspek dan kriteria; 3) Calon lembaga usaha dinyatakan layak untuk ditumbuhkan menjadi lembaga usaha berbadan hukum jika memenuhi nilai minimal 125; 4) Identifikasi dan Verifikasi calon lembaga usaha dilakukan melalui pertemuan koordinasi dengan melibatkan Dinas yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani lembaga usaha, penyuluh perikanan dan penyuluh koperasi
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan memberikan fasilitasi legalisasi lembaga usaha sub sektor pengolahan dan/atau pemasaran, baik yang meliputi legalisasi lembaga usaha maupun perubahan kegiatan usaha.
- Pendampingan dilakukan terhadap lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sub sektor pengolahan dan/atau pemasaran baik yang ditumbuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun oleh pihak lainnya.

Pendampingan dapat berupa antara lain pelatihan, pembimbingan, pelatihan personal, atau konsultasi sesuai dengan kebutuhan lembaga usaha

- Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan dalam rangka menilai tingkat kinerja lembaga usaha. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tiap indikator antara lain: 1) Badan Usaha Aktif; 2) Kinerja Usaha yang Semakin Sehat; 3) Tingkat Kesehatan Kondisi Keuangan; 4) Kohesivitas dan Partisipasi Anggota; 5) Dampak Terhadap Keluarga; dan 6) Dampak Terhadap Masyarakat



Gambar 3. 13 Pembahasan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 16 Oktober 2024

### 3. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Oktober 2024

- Pertemuan dilaksanakan di Kebumen. Pertemuan dihadiri oleh calon pengurus, calon pengawas, calon anggota koperasi, perwakilan dinas perikanan kabupaten Kebumen serta perwakilan dinas koperasi Kabupaten Kebumen.
- Calon koperasi didaftarkan dengan nama koperasi produsen udang pansela kebumen dengan anggota sejumlah 35 orang yang terdiri dari beberapa kelompok usaha pengolahan hasil perikanan dengan produk olahan perikanan dan pemasaran dari hasil budidaya udang vanname.

- Calon koperasi berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga usaha berbadan hukum dengan mematuhi berbagai peraturan tentang manajemen perkoperasian.
- Omzet dari masing-masing kelompok bervariasi antara Rp. 100.000.000 – Rp. 250.000.000 per bulan dengan wilayah pemasaran di Unit Pengolahan Udang wilayah Jakarta dan sekitarnya.



Gambar 3. 14 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen pada tanggal 29 Oktober 2024

#### 4. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tanggal 5 November 2024

- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 di ruang rapat Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang yang dihadiri oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang, Penyuluh Perikanan Kabupaten Batang, Kelompok/calon koperasi Samudera Mandiri Sejahtera, dan Tim Kerja Kelembagaan - Direktorat Pengembangan Usaha.
- Dalam diskusi ini di sepakati bahwa nantinya koperasi yang terbentuk adalah koperasi produsen dengan unit usaha lain berupa konsumen, pemasaran, dan Jasa (sewa dan pengangkutan).
- Koperasi Samudera Mandiri Sejahtera beranggotanya 12 orang. Rencana usaha Koperasi saat ini adalah pemasaran ikan dengan omset 18 juta/bulan.

Kedepannya koperasi berencana akan melakukan usaha pendinginan ikan/gudang beku dan ikan asin.

- Salah satu calon anggota koperasi melakukan usaha pengeringan ikan (pembuatan ikan asin) dengan produksi 5 ton/bulan. Harga per kilonya bervariasi berdasarkan grade yaitu 40.000 – 75.000/Kg dengan pemasaran sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, Cilegon, dan Kalimantan dengan pengiriman melalui ekspedisi Baraka. Kemasan yang digunakan masih menggunakan plastik kemasan sederhana.



Gambar 3. 15 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang pada tanggal 5 November 2024

#### 5. Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 2024

- Peningkatan kelembagaan usaha di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan untuk meningkatkan kelembagaan usaha kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok pengolah dan pemasar, kelompok pengawas masyarakat dan kelompok budidaya perikanan. Beberapa kelompok tersebut bersepakat untuk mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Smart Fisheries Village Bangsring.
- Koperasi berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Dusun Krajan 1 RT 4 RW 5 Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur. Anggota koperasi berjumlah 20 orang yang merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok yang di sekitar wilayah Desa Bangsring.
- Modal koperasi sebesar Rp. 2.400.000 yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp. 2.000.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 400.000,- yang berasal dari iuran anggota koperasi. Koperasi akan mengelola usaha di sekitar wilayah desa Bangsring dengan omzet ± Rp. 100.000.000,- per bulan



Gambar 3. 16 Rapat Pra-Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 2024

#### 6. Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas pada tanggal 12 November 2024

- Kegiatan dihadiri oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota serta UMKM dan koperasi yang berasal dari Pasuruan dan daerah sekitarnya;
- Kegiatan dibuka oleh Dirjen PDSPKP yang kemudian dilanjutkan dengan Pemberian Penghargaan kepada UMKM Naik Kelas serta pemberian materi sebagai berikut : 1) *Success Story* Membangun Bisnis UMKM; 2) *Business Mindset and Model*; 3) Kewirausahaan dan Manajemen Usaha; 4) Manajemen Keuangan Praktek Penyusunan Laporan Keuangan berbasis aplikasi; 5) Digitalisasi Usaha untuk UMKM (Praktek aplikasi digital marketing) dan Peluang Kerjasama dengan *Market Place* oleh Frank Silitonga (*Mentor/Business Coaching*); dan 6) Ekspor itu Mudah (Prosedur Sertifikasi HACCP dan HC oleh BP2MHKP dan Bea Cukai Fasilitasi Kemudahan Ekspor UMKM oleh Ditjen Bea Cukai).
- Dalam Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas juga tersedia meja konsultasi untuk layanan 1) Konsultasi Layanan Pembiayaan; 2) Sertifikasi Perizinan Usaha yang meliputi; dan 3) Konsultasi Layanan Ekspor.

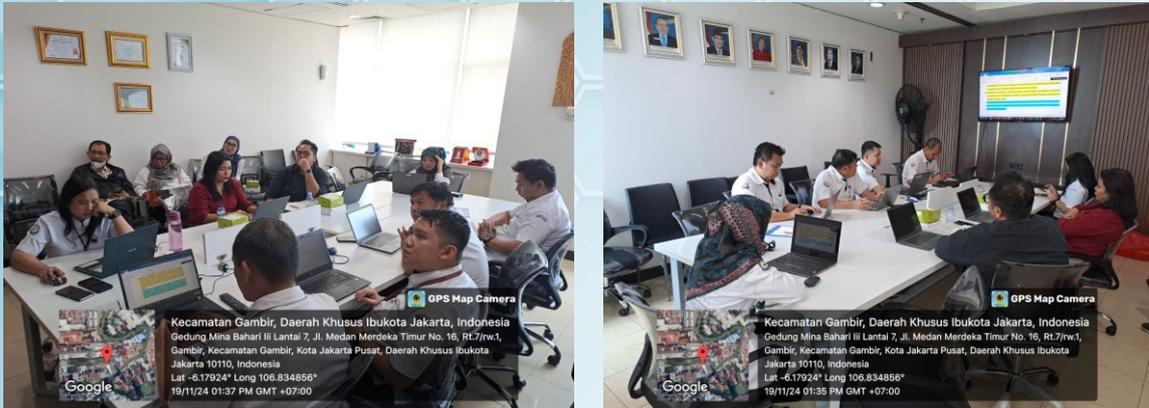


Gambar 3. 17 Pemberdayaan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menuju UMKM naik kelas pada tanggal 12 November 2024

7. Pembahasan Lanjutan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 19 November 2024

- Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Usaha GMB 3 Lantai 12 secara hybrid yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP, USAID Ber-IKAN, Tim Kerja Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha dan PT. Reto Inovasi Indonesia;
- Dalam rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan, beberapa masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
  - a. Perubahan judul menjadi Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan sub sektor pengolahan dan/ atau pemasaran karena lembaga usaha ada yang menjalankan hanya usaha pengolahan perikanan dan/atau pemasaran perikanan
  - b. Penambahan tujuan pedoman yaitu sebagai pedoman penguatan kapasitas lembaga usaha di antaranya mengenai manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan keuangan, literasi keuangan dan diversifikasi produk serta diversifikasi usaha
  - c. Penjabaran definisi lembaga usaha, yaitu setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang

bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 3. 18 Pembahasan Lanjutan Rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada tanggal 19 November 2024

8. Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17-19 Desember 2024
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Wilayah, dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 17-19 Desember 2024. yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pemberdayaan Usaha, Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya. Jumlah peserta 20 peserta, yang terdiri dari 18 koperasi perikanan dan 2 UMKM naik kelas (UMKM ini juga sebagai inkubasi bisnis)
  - Acara dibuka oleh Katimja Kelembagaan Usaha yang diawali dengan sambutan dari perwakilan Kepala Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya.
  - Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan dengan metode ceramah/pemaparan materi teori, kerja kelompok dan diskusi, interaktif peserta, tanya jawab dan games
  - Peserta akan memperoleh 2 jenis sertifikat yaitu sertifikat kehadiran untuk seluruh peserta dan sertifikat kelulusan bagi peserta yang mendapat nilai minimal 70 untuk pos test.



Gambar 3. 19 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17-19 Desember 2024

#### 9. Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Koperasi Dan Pelaku Usaha Untuk Menjadi Mitra BGN dan Mendaftar e-katalog pada tanggal 21 Desember 2024

- Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2024 di RR. EDTC, PKSPL-IPB, Bogor. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh 287 peserta baik yang hadir secara *offline* maupun *online* yang terdiri dari koperasi dan pelaku usaha (PT, CV, maupun UMKM lainnya).
- Koperasi dan pelaku usaha memiliki konektivitas yang kuat dalam mendukung swasembada pangan dan diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG). Koperasi dapat berperan sebagai aggregator penyediaan bahan baku (ikan), di wilayah satuan pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat.
- Terkait usulan menu berbahan baku ikan dalam program MBG, Ditjen PDSPKP perlu memastikan kembali standarisasi spesifikasi ikan agar dapat memenuhi ketentuan gizi pada program MBG, yaitu jenis (sesuai kearifan lokal), ukuran, dan aspek keamanan pangan. Adapun pemilihan jenis menu, akan diserahkan kepada SPPG/Dapur sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan kebutuhan penerima manfaat.
- Ditjen PDSPKP perlu terus melakukan koordinasi intensif dengan para pihak yang berperan dalam program MBG yaitu pengelola SPPG, penyedia bahan baku, dan produsen pangan dengan berbagi peran.
- Dalam hal sebagai mitra penyediaan dapur sehat/SPPG, koperasi/ yayasan dapat mendaftar sebagai mitra BGN via website resmi, serta menyampaikan proposal

kerjasama penyediaan SPPG/dapur sehat. BGN akan melakukan verifikasi sebelum diputuskan sebagai SPPG/Dapur sehat.

- Rencana implementasi MBG Tahun 2025 terbagi dalam 3 *batch*, yaitu:

*Batch I*: Januari-Maret 2025, rencana SPPG sebanyak 900 titik diseluruh indonesia, lokasi sdh ditentukan BGN, kepastian belum dapat dipublish.

*Batch II*: April 2025 s.d waktu blm di tentukan, melihat evaluasi lapangan, rencana SPPG sebanyak 2000 titik, ditentukan berdasarkan usulan mitra melalui website BGN, kemitraan terbuka utk koperasi, yayasan, dan bumdes.

*Batch III*: diimplementasikan sesuai hasil evaluasi batch II.

- Mempertimbangkan antusiasme peserta selama mengikuti sesi fasilitasi pendampingan pendaftaran sebagai Mitra BGN dan pendaftaran e-katalog V-6, Ditjen PDSPKP menghimbau agar seluruh pihak dapat mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Mitra BGN. Hal ini untuk mempermudah proses pendaftaran sebagai Mitra BGN dan pemenuhan tenggat waktu bagi koperasi dan pelaku usaha memenuhi kualifikasi persyaratan menjadi Mitra BGN.



Gambar 3. 20 Koordinasi dalam rangka persiapan Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2024

Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan IV Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi Produsen Bahari Maju Bersama Serang, Kabupaten serang;

- 2) Koperasi Produsen Prima Jaya Lontar, Kabupaten serang; dan
- 3) Koperasi Produsen Samudera Jaya Bahari, Kabupaten serang.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp700.280.685,- atau setara dengan 37,85% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 57,78% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 37,85%.

### **3.2.5 Sasaran Strategis 5**

#### **Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha**

#### **IK6. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)**

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 820 wirausaha, nilai persentase capaian apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian kewirausahaan tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 48,28 %, dengan capaian wirausaha yang terealisasi sebanyak 553 UMKM.

Tabel 3. 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM) lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya)	2024*	820	820	100			
	2023	533	553	103,75			
	2022	200	201	100,50			
	2021						
	2020						

Capaian indikator wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan dan di bina pada tahun 2024 sebesar 820 UMKM Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 553 UMKM atau setara 103,75% dari target 533, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 48,28%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 201 atau setara 100,50% dari target 200, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan mencapai 307,96%.

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024, meliputi:

#### 1. Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP

- Kegiatan Pra Usaha dalam rangka penciptaan wirausaha baru adalah temu bisnis inventor MPHPI dengan Investor Potensial dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024. Turut Mengundang investor potensial PT. Fortune Pasific Capital, BRI Venture, Synergy & Innovation, BNI Centure dan ANGIN (Angel Investment Network Indonesia). Tujuan dilaksanakan kegiatan temu bisnis untuk penjaringan minat investor dengan mitra potensial sesuai dengan bidang usaha yang di usulkan. Hasil *one on one meeting* para inventor diminta untuk menyampaikan proyek bisnis dan akan ditindak lanjuti dengan mencari mitra potensial sesuai dengan bidang usaha yang diusulkan.



Gambar 3. 21 temu bisnis inventor MPHPI dengan Investor Potensial dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024

- Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 200 UMKM wirausaha perikanan. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM, memberikan layanan konsultasi bagi UMKM, mengakselerasi UMKM agar naik kelas. Apresiasi diberikan kepada sejumlah UMKM yang telah berhasil naik kelas, dengan kategori UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Jatim dan BNI, UMKM yang meningkat grade SKPnya, UMKM yang meningkat omsetnya dan UMKM yang meningkat kapasitas kelembagaannya menjadi koperasi. Adapun pelaksanaan workshop dibagi menjadi 3 tema sesuai dengan kebutuhan UMKM yaitu kelas ekspor, kelas penyusunan laporan keuangan dan kelas branding dan digital marketing



Gambar 3. 22 Kegiatan pendampingan wirausaha di Kabupaten Pasuruan

- Kegiatan pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintan, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2024. Bentuk pembinaan dilakukan kepada 50 orang pengolah kerupuk ikan yang berasal dari Sei Lekop dan dihadiri

narasumber praktisi dari Universitas Maritim Raja Ali dan Bea Cukai Tanjung Pinang. Tujuan bimtek adalah memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar siap menuju pasar Malaysia dan Singapura dan mampu menyusun laporan keuangan berbasis aplikasi si apik. Tindak lanjut dari bimtek yaitu Universitas Maritim Raja Ali, dapat secara aktif melakukan pembinaan manajemen usaha kepada umkm pengolah kerupuk dan Bea Cukai Tanjung Pinang dapat mendampingi umkm yang berpotensi untuk dapat melakukan ekspor.



Gambar 3. 23 Kegiatan pembinaan dan pendampingan Wirausaha KP di Kabupaten Bintang

## 2. Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan

Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI pada Triwulan IV telah dilaksanakan di tiga belas kabupaten/kota. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, lembaga pembiayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, dan praktisi yang menyampaikan success story menjalankan usaha dan memberikan motivasi kepada calon wirausaha kelautan dan perikanan. Hadir sebagai peserta adalah pelaku usaha yang terdiri wirausaha dan calon wirausaha kelautan dan perikanan.

Hasil dari pelaksanaan Bimtek Wirausaha dan Akses Pembiayaan yaitu terjaringnya calon wirausaha yang berminat untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan, sementara bagi UMKM eksisting diharapkan mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan. Pada kegiatan ini juga disediakan layanan perizinan oleh DPMPTSP setempat untuk memberikan pendampingan dalam pengajuan dan pengurusan NIB.

Tabel 3. 8 Pelaksanaan Bimtek Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan di 13 lokasi

No	Nama/Fraksi/Dapil	Dapil	Provinsi	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Drs. I Made Urip, M.Si.	Bali	Bali	Kab. Tabanan	18 Oktober 2024

2	Ir. H. Teuku Abdul Khalid, M.M.	Aceh II	Aceh	Kab. Aceh Timur	27 Oktober 2024
3	drh. Slamet	Jawa Barat IV	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	18 November 2024
4	Siti Hediati Soeharto, S.E	DIY	DIY	Kab. Bantul	30 November 2024
5	Ahmad Yohan, M.Si.	NTT I	NTT	Kota Kupang	3 Desember 2024
6	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari	Jawa Tengah V	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	8 Desember 2024
7	Saadiah Uluputty	Maluku	Maluku	Kab. Maluku Tengah	10 Desember 2024
8	Alex Indra Lukman, S.Sos	Sumatera Barat I	Sumatera Barat	Kota Padang	11 Desember 2024
9	Julie Sutrisno	NTT II	NTT	Kab. Kupang	12 Desember 2024
10	Ir. Panggah Susanto, MM	Jawa Tengah VI	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	13 Desember 2024
11	Bambang Purwanto, S.ST, MH	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	18 Desember 2024
12	Alien Mus, S.Sos. MP	Maluku Utara	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	20 Desember 2024
13	Sudin, SE.	Lampung I	Lampung	Kab. Pesawaran	20 Desember 2024



Gambar 3. 24 Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp4.353.065.762,- atau setara dengan 57,49% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat

dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 74,21% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 57,49%.

### 3. Pengembangan Startup Millennial

- Kegiatan pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Makassar, dilakukan kepada 50 UMKM hasil perikanan lingkup kota Makassar. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk meningkatkan Kerjasama antara UKM dan Nelayan usaha rintisan yang inovatif dan berteknologi untuk menjalin kerjasama sehingga dapat memperluas pemasaran dan transfer teknologi sehingga dapat memajukan sektor kelautan dan perikanan. Startup Simultan sebagai salah satu pelopor energi terbarukan melalui pemanfaatan limbah berbasis *zero waste* berkerjasama dengan UMKM Perikanan di Kota Makassar. Dalam proses bisnisnya untuk menghasilkan hasil akhir berupa biosolar sabun pencuci piring menggunakan limbah minyak goreng yang dikumpulkan dari pengolah olahan hasil perikanan seperti pengolah abon ikan dan nugget ikan.



Gambar 3. 25 pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Makassar

Kegiatan pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Semarang, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 - 14 Desember 2024. Bentuk pembinaan dilakukan di kepada UMKM Perikanan lingkungan fakultas perikanan universitas Diponegoro dan mendukung dan mendorong mahasiswa agar dapat menjadi wirausaha muda. Tujuan dilaksanakannya kegiatan untuk mendukung UMKM yang bergerak di bidang perikanan dengan melihat kebutuhan dari UMKM lingkup fakultas perikanan UNDIP seperti perizinan, persiapan perluasan pemasaran diluar lingkungan kampus, serta pengetahuan literasi keuangan.



Gambar 3. 26 Kegiatan pembinaan startup millennial dan mitra usaha di Kota Semarang

### IK7. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha adalah Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan).

**Tabel 3. 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha Triwulan IV Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	2024*	1660	1660	100			
	2023	-	-	-			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1.660 UMKM, dan terealisasi sebanyak 1.660 UMKM, nilai persentase capaian apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100%. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Fasilitas akses pembiayaan yang dilakukan berupa edukasi literasi keuangan dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM dalam mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank di lokus-lokus prioritas KKP ditambah dengan Fasilitas kegiatan pemberdayaan usaha lainnya melalui kegiatan GISELA, Kemitraan, perizinan dan kelembagaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi pemberdayaan usaha pada Triwulan IV tahun 2024 antara lain:

#### **1. Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor.**

- Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, dan dihadiri oleh 60 peserta, terdiri dari pengolah dan pemasar, penyuluh perikanan, dan aparat Dinas dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok. Hadir sebagai narasumber ialah 1) Bapak Sugiyo (Manager Mikro PT Pegadaian Area Bogor); 2) Ibu Lienda Diana (Pemimpin Cabang PNM Bogor); 3) Bapak Agus Supriyanto (Pemimpin UKM Pitu Pangan); 4) Bapak Adi Wibowo (Katimja Uji Terap Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan); dan 5) Bapak Jamaluddin (Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha)
- Mayoritas pelaku usaha adalah usaha mikro kecil, sehingga kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, dan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan program-program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha sebagai bantuan akses permodalan.
- Dalam diskusi dengan para pelaku UMKM, banyak pelaku meminta penjelasan besaran bunga di PNM dan KUR Syariah di Pegadaian beserta syarat-syarat dalam pengajuannya. Selain sosialisasi pembiayaan, peserta diperkenalkan juga budaya menabung dengan investasi emas melalui PT. Pegadaian. Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti dan berpartisipasi aktif untuk memperoleh

informasi terkait ragam skema kredit dan produk keuangan/investasi dari PT PNM dan PT Pegadaian. Pada kesempatan ini juga telah terfasilitasi penerbitan NIB dari UMKM PT Jawla Food.

- Acara ditutup oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan Direktorat Usaha dan Investasi . Dari kegiatan ini diharapkan agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan, dan menekankan pentingnya legalitas usaha khususnya perijinan dasar NIB serta pentingnya kepemilikan SKP, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan meningkat skala usahanya baik dari segi aset maupun omset usaha.

## **2. Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Barat**

- Dalam rangka mendorong peningkatan dan keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan kegiatan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 November 2024, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB (Muslim, ST, M.Si), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat (Ir. Lalu Sukawadi), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perikanan Kota Mataram, dan dihadiri oleh 139 orang yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, penyuluh perikanan, serta aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dari Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah.
- Hadir sebagai Narasumber ialah 1) Bapak Benny Djuaedy (Kepala Departemen Mikro PT Pegadaian Kantor Pusat Jakarta); 2) Bapak Jumadil Ghilman Habibi (Manajer Mikro PT Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram); 3) Bapak Sujaraman (Direktur Sasak Maiq) produsen produk olahan berbasis rumput laut dan perikanan dan 4) Ibu Arlina Mayasari (JFT Pembina Mutu Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan).
- Dalam diskusi dengan para pelaku UMKM, banyak pelaku meminta penjelasan besaran bunga di PNM dan KUR Syariah di Pegadaian beserta syarat-syarat

dalam pengajuannya. Selain sosialisasi pembiayaan peserta diperkenalkan juga budaya menabung dengan investasi emas melalui PT. Pegadaian. Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti dan berpartisipasi aktif untuk memperoleh informasi terkait ragam skema kredit dan produk keuangan/investasi dari PT PNM dan PT Pegadaian. Pada kesempatan ini juga telah terfasilitasi penerbitan NIB dari UMKM PT Jawa Food.

- Acara ditutup oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan Direktorat Usaha dan Investasi yang menyampaikan harapannya agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, dan menekankan pentingnya legalitas usaha khususnya perijinan dasar NIB serta pentingnya kepemilikan SKP dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan meningkat skala usahanya baik dari segi aset maupun omset usaha.

### **3. Rapat koordinasi Kelompok Kerja Akselerasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 10 Desember 2024**

- Rapat dihadiri oleh perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BSI, PT. Pegadaian, Biro Perencanaan Setjen KKP, BLU LPUMKP, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT, Pusat Penyuluhan BPPSDM, Direktorat Ikan Air Payau DJPB, Setdtjen PDSPKP, dan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
- Total Penyaluran KUR SKP tahun 2019 - 2024 sebesar Rp40,49 triliun yang disalurkan kepada 1.025.262 debitur, dengan rata-rata kenaikan realisasi KUR per tahun sebesar 20,25%. Penurunan terjadi di tahun 2023, yang disebabkan terdapat perubahan kebijakan suku bunga KUR dari 3% menjadi 6% sehingga realisasi penyaluran mengalami perlambatan.
- Realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan sampai bulan November 2024 adalah sebesar Rp6,63 triliun yang disalurkan kepada 127.600 debitur. Realisasi ini meningkat 10,92% dari capaian pada periode yang sama tahun 2023 (YoY) sebesar Rp5,97 triliun, dengan jumlah debitur meningkat sebanyak 10,08% (YoY).
- Rincian bidang usaha yang menerima penyaluran yaitu budidaya ikan (33,86%), perdagangan hasil perikanan (33,52%), penangkapan ikan (22,67%), jasa perikanan (7,05%), pengolahan hasil perikanan (2,70%), dan pergaraman (0,19%)

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dampak penyaluran kredit program terhadap perkembangan UMKM penerima kredit di 11 (sebelas) provinsi yang telah dilakukan kegiatan fasilitasi pembiayaan dan literasi keuangan, serta bimbingan teknis pembiayaan dan layanan gerai investasi dan layanan usaha (GISELA), diperoleh informasi sebagai berikut:
  - 1.040 debitur sektor kelautan dan perikanan yang telah mengakses KUR
  - Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp155 Miliar.
  - Jumlah debitur yang naik kelas 980 debitur (dilihat dari penambahan jumlah tenaga kerja, nilai omzet dan/atau nilai asset sebelum dan sesudah menerima KUR)
    - Data penyaluran KUR dari bank Himbara dan lembaga keuangan non bank hingga November 2024 dapat dirinci sebagai berikut:
    - PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan KUR sektor perikanan sebesar Rp213 miliar kepada 2.065 debitur, dengan penyaluran terbesar di Provinsi Aceh pada sub sektor budidaya air tawar. Realisasi penyaluran mengalami penurunan dibandingkan periode sama pada tahun 2023 dikarenakan faktor risiko di usaha perikanan tangkap dan tingkat Non Performing Loan yang relatif tinggi.
    - PT Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sektor perikanan sebesar Rp532 miliar kepada 577.000 debitur. Peyaluran KUR terbesar berada di Regional Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, untuk usaha perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan. Dari hasil sosialisasi pada klaster pembiayaan di kampung nelayan modern Kecamatan Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Bank Mandiri telah merealisasikan penyaluran kredit untuk 2 debitur di lokasi tersebut dan 86 debitur di Kabupaten Tuban untuk usaha penangkapan dan pengolahan ikan. Untuk itu Bank Mandiri berencana memperluas cakupan jangkauan wilayah kecamatan untuk lokasi klaster pembiayaan dimaksud.
    - PT. BNI telah menyalurkan KUR sektor perikanan sebesar Rp103,6 miliar kepada 470 debitur. Penyaluran dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, mayoritas untuk usaha budidaya air tawar, budidaya air laut, jasa budidaya air tawar, dan pembenihan air tawar. BNI bekerjasama dengan KKP telah memfasilitasi pembiayaan bagi pelaku budidaya pada

kampung perikanan budidaya di Kabupaten OKU Timur, dan berharap untuk dapat berkolaborasi pada lokasi kampung budidaya lainnya serta mendukung program MBG.

- PT. BRI telah menyalurkan KUR sektor perikanan sebesar Rp2,9 triliun kepada 67.132 debitur, dengan penyaluran terbesar untuk sub sektor perikanan budidaya, dan lokasi terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan.
- PT. PNM telah menyalurkan kredit ultra mikro sektor perikanan senilai Rp742 miliar kepada 145.096 debitur, dan terbesar di lokasi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. PT. PNM telah memfasilitasi pembentukan klaster pembiayaan usaha perikanan (pengolahan, dan budidaya) di 78 lokasi seluruh Indonesia. Produk skema pembiayaan yang ditawarkan adalah Mekaar (*group lending*) dan Madani Tumbuh (*non group lending*), dengan plafon kredit maksimal Rp50 juta, dan bersifat tematik sesuai jenis komoditas yang akan dikembangkan pada setiap lokasi klaster.
- PT. Pegadaian telah menyalurkan KUR sebesar Rp30,07 miliar kepada 2.099 debitur, untuk usaha perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan lokasi terbesar berada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah. Jenis KUR yang disalurkan mencakup kredit super mikro (plafon maksimal Rp10 juta), dan kredit mikro (plafon maksimal Rp50 juta). Saat ini realisasi penyaluran mengalami penurunan dikarenakan faktor tingginya risiko usaha penangkapan ikan.
- Ditjen Perikanan Budidaya juga memiliki program unggulan Korporasi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 dan 2024 di 25 lokasi, yang berpeluang untuk dapat difasilitasi akses permodalan oleh lembaga keuangan bank/non bank.
- Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan sosialisasi pembiayaan bagi nelayan di 7 lokasi, dan pendampingan usaha nelayan di 34 provinsi yang telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp6,6 miliar bagi nelayan.
- Inspektorat IV KKP menyampaikan masukan agar KKP dapat segera menginput data UMKM sektor kelautan dan perikanan pada aplikasi SIKP sebagai sumber data calon debitur potensial bagi lembaga keuangan bank/non bank. Saat ini tahap Integrasi Data Kusuka dengan SIKP masih

dalam tahapan penyiapan rancangan Perjanjian Kerjasama yang diinisiasi oleh Setditjen PDSPKP.

#### **4. Bimbingan Teknis Pembiayaan Dan Fasilitas Gerai Investasi & Layanan Usaha (GISELA) di Lamongan pada tanggal 30 Oktober 2024**

- Bimtek Pembiayaan dibuka oleh Katimja Pembiayaan mewakili Direktur PU, dihadiri oleh Kepala PPN Brondong, Kabid Perikanan Tangkap Kab.Lamongan dan 100 pelaku usaha perikanan di sekitar Paciran dan Brondong (50 peserta Forkom Rajungan dan 50 pelaku usaha perikanan);
- Narasumber pada kegiatan antara lain Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan Praktisi Ibu Aulia Siska PT. Sukse Mgae Art;
- Dalam paparan sambutan, Ketua Timja Pembiayaan menyampaikan Tugas dan Fungsi KKP untuk mencapai Visi Asta Cita No. 2 dan 5 yaitu 1). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swaembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, 2). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. Oleh karena itu KKP mengejawantahkan Asta Cita dengan tetap melanjutkan 5 arah kebijakan prioritas;
- Sambutan oleh Dinas Perikanan Kab.Lamongan, yang diwakili oleh Kabid Perikanan Tangkap, menyampaikan potensi perikanan Perikanan Tangkap dan Budidaya yang ada di Kab.Lamongan. Dari Terdapat 17 Desa di Pesisir Kec. Paciran dan Kec. Brondong. Didukung oleh 5 Tempat Pelelangan Ikan, 2 Pasar Ikan dan 96 pasar tradisional. Dinas Perikanan merasa terbantu atas terselenggaranya kegiatan ini, mengingat masih banyak nelayan yg memanfaatkan pinjaman dari pemodal lokal dengan bunga yang cukup tinggi;
- Kepala PPN Brondong menyampaikan bahwa PPN Brondong memiliki tuisi pembiayaan bagi nelayan, tapi hingga saat ini terkendala karena nelayan tidak memiliki agunan untuk mengajukan pembiayaan di perbankan, namun belum terinfokan bahwa terdapat penyaluran pembiayaan tanpa agunan di perbankan. Hingga saat ini nelayan di sekitar ppn brondong sudah ada yg mengakses pembiayaan oleh

lembaga keuangan perbankan konvensional. LPMUKP sebagai lembaga keuangan non perbankan alternatif, diharapkan dapat menyentuh pelaku usaha perikanan di Kab. Lamongan;

- Ibu Aulia Siska (PT. Mgae) menyampaikan pendampingan penyusunan rencana usaha UMKM dengan memperkuat Penyusunan Rencana Usaha mulai dari Penyusunan Proposal Rencana Usaha, Persiapan Data Keuangan dan Studi Kelayakan Usaha. PT.Mgae siap melakukan pendampingan umkm pelaku usaha perikanan di Brondong, Kab.Lamongan untuk memajukan usahanya dan guna mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan yg ada;
- Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan paparan mengenai Manfaat Jaminan Sosial Bagi seluruh Pekerja termasuk Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan melalui Program Jaminan Sosial yg dapat diakses yaitu sebagai pekerja mandiri. Program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yg dapat memberikan perlindungan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan iuran Rp.16.800/bulan (JKK & JKM) dan bila ditambah JHT maka iuran menjadi Rp.20.000/bulan.
- Kepala Cabang Bank Jatim menginformasikan Program KUR Bank Jatim dengan Produk KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil/Khusus. Menginformasikan bahwa Pengajuan KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak memerlukan Jaminan Agunan namun melalui seleksi yg cukup ketat dalam memutuskan untuk membiayai usaha UMKM dan Nelayan. Bank Jatim siap membantu pembiayaan pelaku usah perikanan di Kab.Lamongan.

#### **5. Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang**

- Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 yang dibuka oleh Katimja Pembiayaan Direktorat Pemberdayaan Usaha dan dihadiri oleh sekitar 110 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, penyuluh dan pelaku UMKM pengolah dan pemasar yang telah dikurasi dan yang belum dikurasi.

- Narasumber yang dihadirkan pada kesempatan tersebut antara lain dari BRI Cabang Karawang, BBP3KP, Shopee Indonesia dan Pendamping Usaha UMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
- Poin-poin yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: 1) Bapak Encep Priatna Kusumah, BRI Cabang Karawang menyampaikan materi tentang Program Pembiayaan Kredit Program dan Sosialisasi PP No 47 tahun 2024; 2) Ibu Rini, BBP3KP menyampaikan materi tentang Program Inkubasi Bisnis untuk UMKM dan program inkubasi bisnis 2025; 3) Bapak Samsi, Pendamping UMKM Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan dan perlunya UMKM memiliki laporan pencatatan keuangan yang rapi agar memudahkan mendapatkan pembiayaan dari perbankan; 4) Bapak Caesar, Shopee Indonesia menyampaikan materi tentang tren minat konsumen, tips berjualan dan optimalisasi fitur di Shopee serta praktek membuat etalase di Shopee dan strategi menarik pengunjung.
- Hasil dari kegiatan bimtek ini adalah terdapat sekitar 12 UMKM di Karawang menyatakan minatnya untuk masuk kedalam program inkubasi bisnis dan terdapat sekitar 7 orang yang berhasil membuat toko online di Shopee pada saat itu.



Gambar 3. 27 Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Karawang

## 6. Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitasi Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi

- Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 yang dibuka secara online oleh Direktur Pemberdayaan

Usaha dan dihadiri oleh sekitar 110 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Dinas Perikanan Kota Bekasi, penyuluh dan pelaku UMKM pengolah dan pemasar yang telah dikurasi dan yang belum dikurasi.

- Narasumber yang dihadirkan pada kesempatan tersebut antara lain dari BJB Cabang Cikarang, BBP3KP, Shopee Indonesia dan Pendamping Usaha UMKM Kementerian Koperasi dan UKM.
- Poin-poin yang disampaikan oleh narasumber sebagai Berikut : 1) Ibu Sucilia, BJB Cabang Cikarang menyampaikan materi tentang Program Pembiayaan Kredit Program dan Sosialisasi PP No 47 tahun 2024; 2) Ibu Rini, BBP3KP menyampaikan materi tentang Program Inkubasi Bisnis untuk UMKM; 3) Ibu Dewi, Pendamping UMKM Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan materi tentang pentingnya pencatatan keuangan usaha bagi UMKM dan praktek penyusunan laporan keuangan usaha; 4) Bapak Caesar, Shopee Indonesia yang menyampaikan materi tentang tren minat konsumen, tips berjualan dan optimalisasi fitur di Shopee serta praktek membuat etalase di Shopee dan strategi menarik pengunjung.
- Hasil dari kegiatan ini adalah terdapat sekitar 5 UMKM pengolah yang telah menjadi tenant Inbis BBP3KP dan berhasil meningkatkan usaha dan pendapatannya dan terdapat 22 orang yang telah berhasil membuat toko online di Shopee.



Gambar 3. 28 Pertemuan Bimbingan Teknik Fasilitas Pembiayaan dan Layanan Gerai Investasi dan Layanan Usaha di Bekasi

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja UMKM kelautan dan perikanan

yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga Triwulan IV anggaran yang terserap sebesar Rp1.848.300.248,- atau setara dengan 56,01% dari total anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 57,42% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 56,01%.

#### **IK8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)**

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir. UMKM tersebut adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

Tabel 3. 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha	2024*	79	79	100	5	17,71	354,20
	2023	-	-	-			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 125 UMKM. Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 75 UMKM yang terdiri dari 70 UMKM yang terfasilitasi kemitraan, 3 UMKM yang terfasilitasi layanan perizinannya dan 2 UMKM yang terfasilitasi pembinaan melalui start up. Capaian ini setara dengan 78,13% dari target triwulan II sebanyak 34 UMKM. Jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka capaian UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha sebanyak 96 UMKM atau setara dengan 60% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 dari target 125 pelaku usaha. capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat metode perhitungan baru untuk IKU UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi yaitu dengan menambahkan jumlah pelaku usaha yang berminat/akan melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan implementasi perizinan usaha dan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraannya dengan startup perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sosialisasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan dan pembukaan gerai perizinan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan mengundang Direktorat Usaha dan Investasi sebagai salah satu pembicara, antara lain :

- a. Pembukaan Gerai Pelayanan Perizinan Pada Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendorong peningkatan dan keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan kegiatan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 November 2024, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, dan dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari pengolah dan pemasar, penyuluh perikanan, dan aparat Dinas dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota

Depok. Hadir sebagai narasumber adalah : 1) Bapak Sugiyo (Manager Mikro PT Pegadaian Area Bogor); 2) Ibu Lienda Diana (Pemimpin Cabang PNM Bogor); 3) Bapak Agus Supriyanto (Pemimpin UKM Pitu Pangan); 4) Bapak Adi Wibowo (Katimja Uji Terap Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan); 5) Bapak Jamaluddin (Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha)

Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti dan berpartisipasi aktif untuk memperoleh informasi terkait ragam skema kredit dan produk keuangan/investasi dari PT PNM dan PT Pegadaian. Pada kesempatan ini juga telah terfasilitasi penerbitan NIB dari UMKM PT Jawa Food.

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan Direktorat Usaha dan Investasi yang menyampaikan harapannya agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan, dan menekankan pentingnya legalitas usaha khususnya perijinan dasar NIB serta pentingnya kepemilikan SKP dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan meningkat skala usahanya baik dari segi aset maupun omset usaha.



Gambar 3. 29 Dokumentasi Kegiatan Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor

- b. Pembukaan Gerai Pelayanan Perizinan dan promosi investasi, serta pameran Trade Expo Indonesia 2024

Telah dilakukan fasilitasi pelayanan dan kemitraan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan di ICE BSD dalam rangkaian acara pameran *Trade Expo* Indonesia 2024. Ditjen PDSPKP dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran turut serta dengan membuat gerai konsultasi yang terletak di booth Indonesia Export Consultation Center dan

promosi investasi yang berisi tentang materi promosi investasi untuk komoditas unggulan Indonesia, antara lain : udang, rumput laut, lobster, dan nila.

Pelaku usaha yang datang ke dalam gerai atau booth Ditjen PDSPKP merasa informasi yang diberikan sangat membantu, terutama pelaku usaha yang bidang usaha utamanya budidaya, ingin mengembangkan usahanya ke pengolahan setelah melihat prospek yang menjanjikan yang ditawarkan di dalam materi promosi investasi.

Pelaku usaha juga menanyakan terkait perizinan apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin memperluas bidang usaha mereka di bidang pengolahan, pelaku usaha berminat untuk membuka perluasan usaha mereka di bidang perikanan. Dikarenakan pelaku usaha belum memiliki pengalaman pada bidang perikanan, diperlukan bimbingan terkait pemenuhan legalitas dan sertifikasi mutu untuk memenuhi persyaratan ekspor oleh negara tujuan.

Pelaku usaha yang datang pada booth konsultasi ekspor, banyak menanyakan terkait regulasi ekspor produk perikanan, pelaku usaha juga diarahkan untuk bekerjasama atau bermitra dengan supplier yang tersebar di seluruh Indonesia untuk pemenuhan bahan baku.



Gambar 3. 30 Dokumentasi Kegiatan Gerai Pelayanan Perizinan dan promosi investasi, serta pameran Trade Expo Indonesia 2024 di Provinsi Banten

c. Pembukaan Gerai Pelayanan Perizinan pada Workshop Pemberdayaan Usaha

Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan Workshop Pemberdayaan Usaha yang digelar di Pasuruan, Jawa Timur, Workshop tersebut diikuti 300 UMKM perikanan se-Jawa Timur UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah seharusnya UMKM berperan sebagai pilar

utama perekonomian Indonesia, kegiatan di Pasuruan juga ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas.

Ditjen PDSPKP ingin UMKM perikanan, khususnya di Jawa Timur bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, juga menyiapkan layanan konsultasi langsung untuk 300 UMKM yang dihadirkan. Layanan tersebut meliputi pembiayaan dari LPMUKP, Bank Jatim dan BNI, perizinan berusaha, perizinan Usaha Pengolahan Ikan, perizinan Usaha Pemasaran Ikan serta sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Pemberdayaan Usaha juga mengajak rekan-rekan dari BPJPH untuk memberikan konsultasi Halal, BPOM untuk PIRT/MD, BPPMHKP terkait sertifikasi HC/HACCP dan LNSW untuk konsultasi prosedur ekspor bagi UMKM.



Gambar 3. 31 Dokumentasi Kegiatan Gerai Pelayanan Perizinan pada Workshop Pemberdayaan Usaha di Kabupaten Pasuruan

## 2. Sosialisasi Pengawasan Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka implementasi pengawasan perizinan berusaha dan pengenalan aplikasi pelaporan kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan melalui pendampingan kepada pelaku usaha untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Satwas PSDKP Makassar, Komplek Pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong Untia Biring Kanaya, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241. Kegiatan dihadiri oleh 11 pelaku usaha yang terdiri dari PT. Dunia Marine Product, PT. Hasil Indo Sejahtera, PT. Jireh Commodity, PT. Kenndo Fisheries Indonesia, PT. Keumkang Industri Indonesia, PT. Lautan Sakti Jaya, PT. Mitra Kartika Sejati, PT. Pacific Green

Algae, PT. Yin Jing Internasional, PT. Lintas Antar Nusa dan PT. Mina Maju Sejahtera

LKU ini menjadi salah satu kewajiban pada pemenuhan persyaratan khusus perizinan berusaha yang harus disampaikan secara berkala. Laporan tersebut berfungsi untuk memantau perkembangan usaha, serta sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. LKU juga sebagai bahan Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan inspeksi rutin.

Untuk implementasi pelaporan LKU akan dilaksanakan secara digital melalui Modul Pengelolaan Laporan Kegiatan Usaha (LKU). Modul tersebut adalah modul yang dirancang untuk membantu mengelola dan memantau laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha.

Layanan yang terdapat pada modul untuk pelaku usaha adalah : 1) Penanggung Jawab pelapor LKU dapat melakukan registrasi ke modul pengelolaan LKU; 2) Pelaku usaha memvalidasi penanggung jawab pelapor LKU yang melakukan registrasi; 3) Penanggung Jawab dapat membuat LKU secara digital; 4) Penanggung Jawab dapat mengirim LKU elektronik kepada Eselon 1 KKP dan Ditjen PSDKP; 5) Penanggung Jawab dapat memperbaiki LKU secara online jika diminta untuk diperbaiki oleh verifikator; 6) Penanggung Jawab melakukan pengesahan dokumen LKU secara elektronik; 7) Penanggung Jawab dapat melihat riwayat pengiriman LKU elektronik.



Gambar 3. 32 Sosialisasi Pengawasan Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

### 3. Verifikasi Penerbitan Sertifikat Standar

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar usaha selama periode triwulan IV 2024, telah dilaksanakan 5 (Lima) rapat verifikasi, pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan

penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP.

Adapun Selama periode Oktober - Desember 2024 telah diterbitkan 46 sertifikat standar kepada 33 pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 33 Kegiatan Verifikasi Penerbitan Sertifikat Standar

#### 4. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha telah dilakukan kunjungan lapangan ke UPI yang telah memiliki sertifikat standar di Karawang, Pasuruan dan Pekalongan. UPI tersebut antara lain :

##### 1) PT. *Sindabad Marine Pioneer*

- PT *Sindabad Marine Pioneer* merupakan PMA dari Korea Selatan dengan dengan nilai investasi senilai Rp. 10,1 M.
- Saat ini Perusahaan memiliki beberapa 6 KBLI yaitu Industri pembekuan ikan, industri pembekuan biota air lainnya, industri penggaraman / pengeringan biota air lainnya, industri penggaraman / pengeringan ikan, industri pendinginan / pengesan biota air lainnya dan industri pengolahan/pengawetan lainnya.
- PT *Sindabad Marine Pioneer* telah melakukan perluasan usaha dan berhasil melakukan ekspor telur ikan terbang kering ke Jepang, China,

Taiwan dan Rusia. Sampai dengan Oktober 2024 total volume ekspor telur ikan terbang kering sebesar 231.260 kg/tahun dengan nilai 13.050.340 USD, sedangkan total volume ekspor telur ikan terbang beku sebesar 796.350 kg/tahun dengan nilai 12.120.315 USD.

- Direncanakan pada tanggal 12 November 2024 PT. Sindabad Marine Pioneer akan melakukan eskpor telur ikan terbang kering ke Korea Selatan dengan volume sebesar 3 ton dengan Nilai USD 200.000.



Gambar 3. 34 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT Sindabad

## 2) PT *Blue Sea Industry* dan PT *Indo Seafood Korea*

- PT *Blue Sea Industry* dan PT *Indo Seafood Korea* dimiliki oleh pemilik yang sama yaitu Lee Gughyeong, PT *Blue Sea Industry* berdiri sejak tahun 2006 dengan bidang usaha KBLI 10216 bergerak di Surimi dan hanya memproduksi Surimi. Pada tahun 2022, PT *Indo Seafood Korea* berdiri dilokasi yang sama dengan tujuan mengembangkan usaha dengan cara menyerap Surimi yang dibeli dari PT *Blue Sea Industry* untuk memproduksi surimi tersebut menjadi produk turunan (*value added product*) seperti bakso ikan, odeng dll dari Surimi yang di produksi oleh PT. *Blue Sea Industry*.
- KBLI yang dimiliki PT *Indo Seafood Korea* dan PT *Blue Sea Industry* salah satunya memang terdapat kemiripan, yaitu KBLI 10216 tetapi PT *Blue Sea Industry* hanya memproduksi surimi saja, sedangkan PT *Indo Seafood Korea* tidak memproduksi surimi tetapi hanya memproduksi olahan berbahan dasar dari surimi.



Gambar 3. 35 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT. *Blue Sea*

3) PT. Pingroun Food Jakarta dan PT. Daesang Food Indonesia

- PT Pingroun Food Jakarta beralamat di Kawasan Industri LippoCikarang, Delta Silicon I Kav. A8, No. 5A, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi 17550 – Indonesia. Perusahaan ini merupakan PMA dari negara Taiwan. Perusahaan memiliki KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213). Produk yang dihasilkan *Frozen Eel Fillet*. PT Pingroun Food Jakarta memiliki tenaga kerja 31 yang terdiri dari 28 tenaga kerja lokal dan 3 orang tenaga kerja asing. Nilai investasi sebesar Rp 10.001.000.000 yang terdiri dari modal tetap sebesar Rp 5.000.000.000 dan modal kerja Rp 5.001.000.000. Bahan baku didapatkan dari lokal yaitu Kabupaten Indramahyu dan Cirebon berupa Ikan Sidat.
- PT Daesang Food Indonesia yang beralamat di Suryacipta City Of Industry, Jl. Surya Utama Kav.I-25B, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini merupakan PMA dari negara Korea. Perusahaan memiliki KBLI Industri Pengolahan Rumput Laut (10298). Produk yang dihasilkan Rumput Laut Panggang dan Nori. Perusahaan memiliki tenaga kerja 129 yang terdiri dari 126 tenaga kerja local dan 3 orang tenaga kerja asing. Bahan baku PT Daesang Food Indonesia berasal dari impor negara Korea berupa rumput laut jenis



Gambar 3. 36 Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha PT. Pingroun

5. Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha *Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di PT BOFI (Blue Ocean Foods Indonesia) Banyuwangi* pada tanggal 4 Desember 2024

Pada pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Bpk. Suryono Bintang Samudra, Katimja Pelayanan dan Kemitraan Usaha, Pembina Mutu Utama Ditjen PDSPKP Bpk Abdul Rokhman, Direktur Operasional PT BOFI Bpk Mahfudi , Komisariss PT. Mina Segara Merta .

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong peningkatan skala dan keberlanjutan usaha serta fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta melakukan kolaborasi dan sinergi internal lingkup KKP serta lintas Kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, maupun pelaku usaha dan asosiasinya untuk bersama-sama melakukan penguatan usaha melalui pertemuan ini.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan saat ini menjadi sangat penting dalam mendorong percepatan pengembangan usaha serta diharapkan akan menyentuh seluruh permasalahan yang dihadapi pelaku usaha saat ini.

Kadis Perikanan Kab. Banyuwangi menyampaikan bahwa pada tahun 2023 sektor perikanan Banyuwangi mengalami perkembangan yang signifikan dimana berdasarkan data BPS, data perkembangan perikanan Banyuwangi tumbuh sebesar 66% dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya dan nilai tambah sektor perikanan Banyuwangi sebesar Rp 8 Trilyun atau sebesar 7,93% dari total PDRB Kabupaten Banyuwangi. Di Informasikan juga jika di Banyuwangi terdapat 34 usaha pengalengan ikan dan 44 cold storage di Banyuwangi.

Kemudian paparan oleh Bpk. Mahfudi (Direktur Operasional PT BOFI) yang menyampaikan sekilas tentang PT BOFI (*Blue Ocean Foods* Indonesia) dimana perusahaan ini berdiri pada tgl 28 November 2023 yang bergerak di bidang pengalengan ikan. Perusahaan ini mampu mengolah ikan sebesar 5 ton/ hari dan 1.200 ton/bulan dan memiliki fasilitas *cold storage* sebesar 3.000 ton yang terletak di Desa Sukomidi Banyuwangi. Saat ini perusahaan sedang kekurangan pasokan ikan sehingga memerlukan Kerjasama dengan perusahaan penangkapan ikan untuk penambahan stok pengolahan ikan

Penyampaian paparan oleh Bpk I Made Arnawa (Komisariss PT Mina Segara Merta) yang mengungkapkan jika perusahaannya saat ini memiliki 11 kapal penangkap ikan yang terletak di Benoa, Denpasar, Bali. Beliau saat ini sedang mencari perusahaan yang akan menampung hasil tangkapan ikan

perusahaannya. Maka dari itu beliau berharap sekali Kerjasama dengan PT BOFI dapat menyerap semua hasil tangkapan ikan dari PT Mina Segara Merta.

Melalui pertemuan ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk pengembangan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang diketahui oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 3. 37 Fasilitas Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di PT BOFI (Blue Ocean Foods Indonesia) Banyuwangi

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp1.051.282.846,- atau setara dengan 61,80% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 60%, hal ini dikarenakan penyesuaian target indikator kinerja utama akibat adanya *automatic adjustment* masih dalam tahap pengusulan kepada Sesditjen PDSPKP.

### **3.2.6 Sasaran Strategis 6**

**Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

#### **IK9. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan**

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk mencapai capaian tersebut tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada

proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 3. 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	2024*	10770	10770	100	10770	10770	100
	2023	4794	5044	105,21			
	2022	4815	4893	101,61			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Pada tahun 2024, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha sebanyak 10.770 orang sedangkan target pada Triwulan IV sebanyak 6860 orang. Capaian realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV adalah sebesar 9237 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 134,65% dari target pada Triwulan IV.

Capaian indikator Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 sebanyak 10770 tenaga kerja, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 5044 tenaga kerja, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan capaian sebesar 113,52%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 4893 tenaga kerja, maka capaian tahun 2024 mengalami pertumbuhan mencapai 120,11%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya

Dalam rangka peningkatan kelembagaan, telah melibatkan tenaga kerja penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha sebanyak 290 tenaga kerja dari 29 lembaga yang sudah ditingkatkan kapasitasnya. Capaian tenaga kerja tersebut didapatkan dari hasil kegiatan Pendirian Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan telah dilakukan di Aceh, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Kegiatan pendirian lembaga tersebut didukung oleh kegiatan Bimbingan teknis kelembagaan usaha subsektor pengolahan dan pemasaran di Jawa tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur, serta kegiatan penyusunan rancangan Pedoman Umum Penguatan Kelembagaan Usaha Kelautan dan Perikanan Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan.

## 2. Fasilitasi kewirausahaan;

Dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Direktorat Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha melalui UMKM Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, Probolinggo, Semarang, Pasuruan, Bogor, Sampang, Bintan selama periode tahun 2024.

Selain pembinaan juga telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan teknis kewirausahaan dan pembiayaan bekerja sama dengan mitra Komisi IV DPR RI. Bimtek ini telah dilaksanakan di 55 Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Anggota DPR-RI, perwakilan pejabat dari Ditjen PDSPKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, lembaga pembiayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, praktisi dan sebagai peserta adalah UMKM/calon wirausaha kelautan dan perikanan.

Jumlah capaian tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan Penumbuhan wirausaha hasil kelautan dan perikanan sebanyak 5901 tenaga kerja.

## 3. Kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Usaha melalui Temu Fasilitasi Akses Pembiayaan Kelautan dan Perikanan

Jumlah capaian tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sebanyak 1660 tenaga kerja. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya melibatkan tenaga kerja selama tahun 2024 adalah :

- fasilitasi akses pembiayaan kredit kelautan dan perikanan di Semarang, Boyolali, Tuban, Bangka Belitung, NTB dan Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan, akses pembiayaan, serta fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha ultra mikro dalam rangka mendorong UMKM KP naik kelas melalui akses pembiayaan kredit program berbasis kluster pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Narasumber utama berasal dari Bank Mandiri dan PT Pegadaian yang menyampaikan materi literasi keuangan terkait program Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya (gadai emas, Tabungan haji).
- Bimbingan Teknis Pembiayaan dan Fasilitasi GISELA di Bali dan Banyuwangi. Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari perwakilan nelayan, suplier, pengolah, pemasar, dan koperasi serta perwakilan penyuluh perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Narasumber pada kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan lembaga keuangan bank dan nonbank. Tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaku UMKM sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Perbankan dan Non Perbankan serta menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan usahanya.

#### 6. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan dan Kemitraan Usaha

Jumlah capaian tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan fasilitasi pelayanan dan kemitraan usaha sebanyak 2919 tenaga kerja. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya melibatkan tenaga kerja selama tahun 2024 adalah :

- Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan  
Kegiatan ini terdiri dari kegiatan sosialisasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya mempunyai legalitas usaha khususnya perijinan dasar NIB serta informasi tentang adanya perubahan-perubahan pada peraturan perizinan terbaru.
- Fasilitasi Kemitraan

Melalui pertemuan ini beberapa pelaku usaha telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen kemitraan sehingga dapat dijadikan landasan bagi kerjasama di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Pada pertemuan tersebut dihadiri Dinas Perikanan dan Peternakan Provinsi/Kab/Kota, UMKM pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah-wilayah tersebut.

Melalui pertemuan ini juga pelaku usaha telah menandatangani nota kesepahaman sebagai komitmen kemitraan untuk dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat dilakukan Analisa kebutuhan para pelaku usaha untuk dibangun kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan kedepannya.

### 3.2.7 Sasaran Strategis 7

**Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha**

#### **IK10. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ .

Tabel 3. 12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	2024*	75	75	100	75	75	100
	2023	75	82,33	109,77			
	2022	75	80,78	107,70			

	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebesar 75 Pada triwulan IV Realisasi capaian nilai WKB Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 75. Nilai 75 diperoleh dari hasil pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang dikeluarkan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP melalui surat nomor T.44/ITJ.4/HP.550/III/2024 tanggal 5 Maret 2024. Apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 8,90% dari capaian tahun 2023 sebesar 82,33. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 7,13%.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

#### **IK11. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha**

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan,

mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

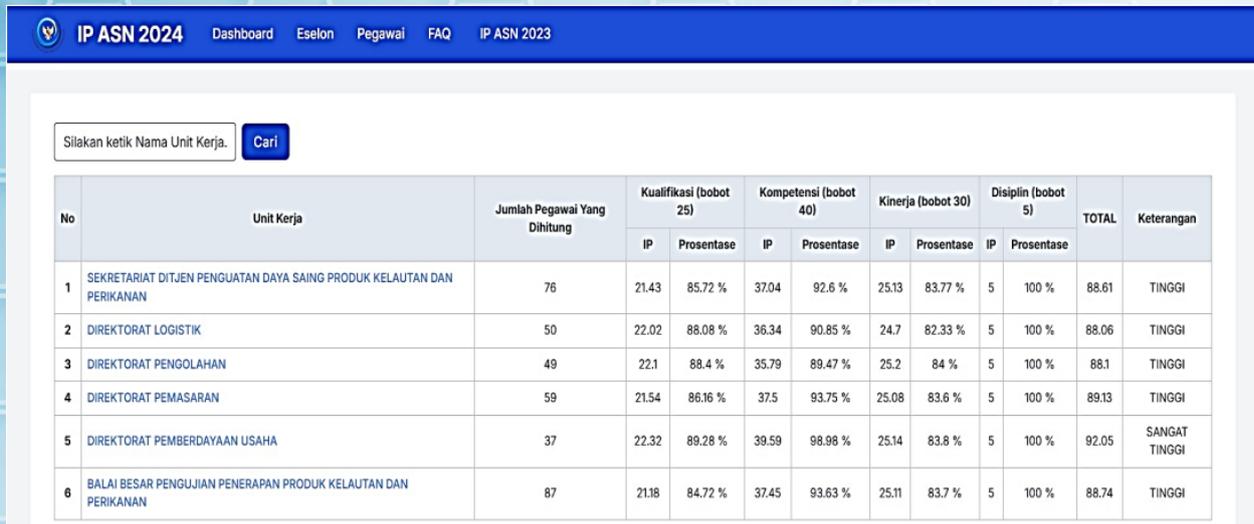
Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin.

Tabel 3. 13 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	2024*	87	92,05	105,80	87	92,05	105,80
	2023	83,20	92,11	110,71			
	2022	83	86,53	104,25			
	2021	73	86,28	118,19			
	2020	72	72	100			

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Realisasi capaian pada triwulan IV sebesar 92,05 atau setara dengan 122,73% dibandingkan dengan target tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, maka nilai IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha mengalami penurunan sebesar 0,06%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 86,53 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,38%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 86,28 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,69%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 72 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 27,85%.

Berdasarkan data Dashboard IP ASN, nilai IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen yaitu sebesar 81,39 (kategori tinggi) yang terdiri atas komponen Kualifikasi 21,18; komponen Kompetensi dengan nilai 30,38; komponen Kinerja dengan nilai 24,83; dan komponen Disiplin dengan nilai 5.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	21.43	85.72 %	37.04	92.6 %	25.13	83.77 %	5	100 %	88.61	TINGGI
2	DIREKTORAT LOGISTIK	50	22.02	88.08 %	36.34	90.85 %	24.7	82.33 %	5	100 %	88.06	TINGGI
3	DIREKTORAT PENGOLAHAN	49	22.1	88.4 %	35.79	89.47 %	25.2	84 %	5	100 %	88.1	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMASARAN	59	21.54	86.16 %	37.5	93.75 %	25.08	83.6 %	5	100 %	89.13	TINGGI
5	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA	37	22.32	89.28 %	39.59	98.98 %	25.14	83.8 %	5	100 %	92.05	SANGAT TINGGI
6	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	87	21.18	84.72 %	37.45	93.63 %	25.11	83.7 %	5	100 %	88.74	TINGGI

Gambar 3. 38 Dashboard IP ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Pada Triwulan IV, kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas berdasarkan rencana aksi yang telah disusun yaitu (1) pelayanan kepegawaian dan (2) peningkatan kompetensi pegawai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat pembahasan teknis acara jiwa korsa lingkup PDSPKP tanggal 19 April 2024 di GMB III KKP.
2. Pemantauan pengisian kinerja pegawai pada aplikasi kinerja BKN triwulan I tahun 2024 tanggal 25 April 2024 di Raiser Ikan Hias, Kab. Bogor.
3. Menghadiri undangan Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024 tanggal 29 April 2024 di Hotel Raffles Jakarta.
4. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Kode Etik Pegawai Ditjen PDSPKP tanggal 22 Mei 2024 di GMB KKP.

## IK12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Tabel 3. 14 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	2024*	84	84,15	100,18			
	2023	80,50	83,30	103,48			
	2022	-	-	-			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 84. Pada tahun 2024 capaian nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan direktorat pemberdayaan usaha adalah 84,15 atau setara dengan 100,18%

dari target tahun 2024 . Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 83,30 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,02%.

### **IK13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 3. 15 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	2024*	100	100	100			
	2023	100	100	100			
	2022	75	100	133,33			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%) pada tahun 2024 ditargetkan 100. Realisasi Capaian Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100 atau setara dengan 100% dari target tahun 2024 . Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 100 maka capaian 2024 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 100 maka capaian 2024 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

#### **IK14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha**

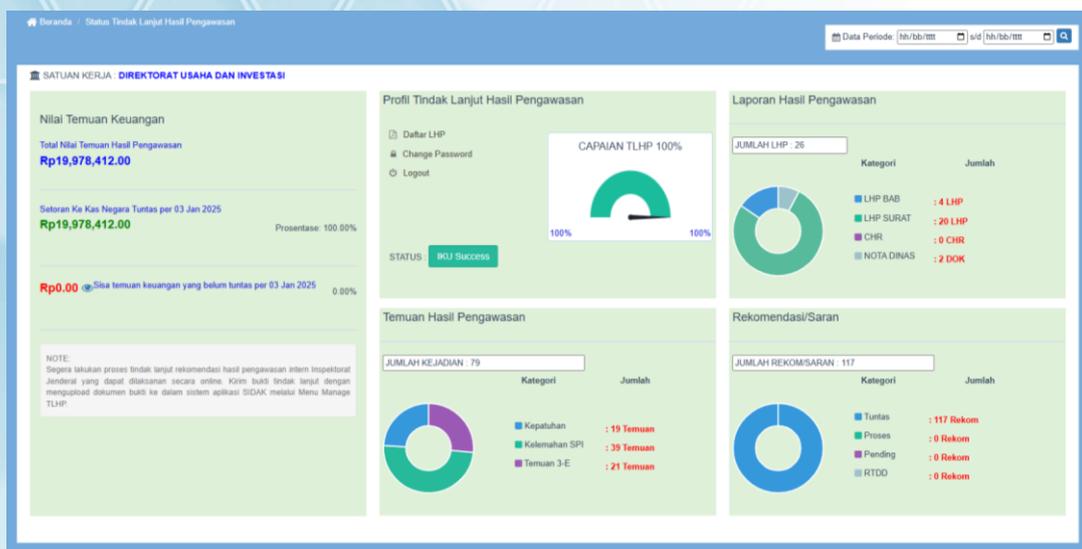
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit. Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan.

Pada Triwulan IV 2024, Direktorat Pemberdayaan Usaha dengan difasilitasi oleh Ditjen PDSPKP telah mengikuti pembahasan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 29 Agustus 2024 terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan II 2024, Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan IV 2024 mencapai 100%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Nilai Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 80. Pada tahun 2024 capaiannya sebesar 100 atau setara dengan 125% dari target tahun 2024 . Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 99 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,01%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 95 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,26%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 92 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,70%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 60 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 66,67%.

Tabel 3. 16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	2024*	80	100	125	80	100	125
	2023	75	99	120			
	2022	70	95	135,71			
	2021	60	92	153,33			
	2020	60	60	100			



Gambar 3. 39 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada Desember 2024

### IK15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 3. 17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	2024*	1	1	100	1	1	100
	2023	1	2	120			
	2022	1	1	100			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Realisasi capaian kinerja Inovasi

pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sebanyak 1 inovasi yaitu SI IKAN BERPROTEIN atau setara dengan 100% terhadap target tahun 2024.

Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2024, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 2 maka capaian 2024 mengalami penurunan sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 1 maka capaian 2024 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

#### **IK16. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar**

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (MP) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Portal *Collaboration Office* (Coofis) di laman <https://portal.kkp.go.id> periode Triwulan IV Tahun 2024, yang pengukurannya dilakukan

setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 18 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	2024*	94	133,33	120			
	2023	92	133,33	120			
	2022	86	100	116,27			
	2021	84	100	119,05			
	2020	-	-	-			

Pada Triwulan IV tahun 2024, persentase unit kerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 133,33% atau setara dengan 141,84% terhadap target Triwulan IV tahun 2024 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja ini tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 133,33. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 100 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 33,30%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 100 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,01%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>) .

## IK17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Pada tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Usaha menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

Tabel 3. 19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)	Target RPJMN (%)	Realisasi Th 2024* (%)	Persentase Realisasi Th 2024* terhadap Target RPJMN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	2024*	95	99,36	104,59			
	2023	95	99,48	104,72			
	2022	90	97,87	108,74			
	2021	-	-	-			
	2020	-	-	-			

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2024 ditargetkan 95%. Capaian Indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%) sebesar 99,36% atau setara dengan 104,59% dari target tahun 2024 sebesar 95%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 99,48 maka capaian 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12%. Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022 sebesar 97,87 maka capaian 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,52%.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan IV Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Triwulan IV tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2024. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

### 4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait upaya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan

3. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan

### 4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan III 2024, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan III 2024	Tindak Lanjut Pada Triwulan IV 2024
1	Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;	Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengawasan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) pada tanggal 7 November 2024 di Kantor Satwas PSDKP Makassar, Komplek Pelabuhan Perikanan Untia, Jl. Salodong Untia Biring Kanaya, Kec. Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241. Kegiatan dihadiri oleh 11 pelaku usaha yang terdiri dari PT. Dunia Marine Product, PT. Hasil Indo Sejahtera, PT. Jireh Commodity, PT. Kenndo Fisheries Indonesia, PT. Keumkang Industri Indonesia, PT. Lautan Sakti Jaya, PT. Mitra Kartika Sejati, PT. Pacific Green Algae, PT. Yin Jing Internasional, PT. Lintas Antar Nusa dan PT. Mina Maju Sejahtera
2	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan melalui kredit program di Lamongan, Bogor	Telah dilaksanakan Kegiatan : 1. Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bogor, pada tanggal 7 November 2024 2. Bimbingan Teknis Pembiayaan Dan Fasilitasi Gerai Investasi & Layanan Usaha (GISELA) di Lamongan pada tanggal 30 Oktober 2024
3	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.	Rapat koordinasi Kelompok Kerja Akselerasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 10 Desember 2024

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [persuratan.pds@kkp.go.id](mailto:persuratan.pds@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**  
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Desember 2024

PIHAK KEDUA,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Pemberdayaan Usaha

Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan	1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)	5
	2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)	8
2. Tersedianya dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i>	3. Dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	3
3. Terlaksananya promosi usaha dan investasi	4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)	3
4. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan	5. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	29
5. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha	6. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)	820
	7. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha (UMKM)	1.660
	8. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha (UMKM)	79
6. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	9. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10.770
7. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	10. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
	11. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
	12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	84
	13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	100
	14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	15. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1
	16. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
	17. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95

#### DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)
1.	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	17.429.138
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024		17.429.138

Jakarta, 24 Desember 2024

**PIHAK KEDUA,**  
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing  
Produk Kelautan dan Perikanan

  
Budi Sulistiyo

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Pemberdayaan Usaha

  
Catur Sarwanto

## Lampiran 2.

### Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan IV

#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM  
Nomor 545/DJPDSPKP.2/TU.140/VII/2024

Yth. : Direktur Jenderal PDSPKP  
Dari : Direktur Usaha dan Investasi  
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II Direktorat Usaha dan Investasi dan Realisasi Anggaran Periode Triwulan II Tahun 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Tanggal : 12 Juli 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian IKU dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Dokumen Peluang Investasi yang Ready to offer

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas. Penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah terealisasi 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Peluang Investasi Komoditas Tuna, secara presentase capaian realisasi dokumen peluang investasi ready to offer sebesar 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 4 dokumen.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp241.738.104,- atau setara dengan 21,45% dari total pagu sebesar Rp1.126.953.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 25%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,45%.

#### 2. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Capaian kinerja promosi usaha dan investasi pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan promosi yaitu "*Indonesia Aquaculture Business Forum (IABF) 2024*" yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 dan "*Indonesia Tuna Investment and Business Forum (ITIBF) 2024*" yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga secara akumulatif sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 3 kegiatan atau tercapai 75% dari target tahun 2024 yakni 4 kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRÉ, BSSN

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.212.755.389,- atau setara dengan 53,74% dari total pagu sebesar Rp2.256.532.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 75%, lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 53,74%.

**3. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya**

Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya sampai dengan triwulan II tahun 2024 terealisasi sebanyak 10 lembaga usaha, atau setara 100% jika dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2024 sebanyak 4 lembaga. Apabila diakumulasikan maka lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya telah terealisasi sebanyak 14 lembaga atau setara dengan 31,11% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 45 lembaga. Adapun lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan II Tahun 2024, yaitu:

- 1) Koperasi nusa indah sukadami, Bekasi
- 2) Koperasi Mega Jelita Raya, Bekasi
- 3) Koperasi konsumen dermasandi maju, tegal
- 4) Koperasi Produsen Mina Guna Sejahtera, Pekalongan
- 5) Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, Kabupaten Jepara
- 6) Koperasi Kalamo Wangi Jaya, Kabupaten Banyuwangi
- 7) Koperasi Produsen Kerapu Warloka Bersinar, Kabupaten Manggarai Barat
- 8) Koperasi Produsen Berkah Jaya Pasir Putih, Kabupaten Karawang
- 9) Koperasi Produsen Mina Peundeuy Sedulur, Kabupaten Karawang
- 10) Koperasi Produsen Multi Pihak Mina Sagara Jaya, Rembang

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp399.367.713,- atau setara dengan 21,59% dari total pagu sebesar Rp1.850.000.000,- Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 31,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 21,59%.

**4. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina**

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebanyak 250 UKM/wirausaha atau setara 100% dari target triwulan I, jika diakumulasikan sampai dengan triwulan II maka jumlah wirausaha yang telah ditumbuhkan/dibina sebanyak 400 UKM/wirausaha atau setara 45,71% dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebanyak 875 UKM/wirausaha. Capaian tersebut terdiri dari 300 UKM/wirausaha yang difasilitasi melalui kegiatan Pembinaan dan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN

Pendampingan Wirausaha Baru dan 100 UKM/wirausaha dari kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Pembiayaan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp2.359.265.673,- atau setara dengan 31,16% dari total pagu sebesar Rp7.572.500.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp18.921.353,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran apabila dilihat dari besaran persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 45,71% yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran sebesar 31,16%.

**5. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi pemberdayaan usaha**

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program dan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela. capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 773 UMKM atau setara dengan 103,06% dibandingkan dengan target triwulan II sebesar 750 UMKM. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 30,13%.

Alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini pada tahun 2024 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp3.300.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap sebesar Rp1.061.871.155,- atau setara dengan 32,18% dari total anggaran. Dalam hal ini persentase penggunaan anggaran lebih besar daripada persentase realisasi capaian sebesar 30,13%, hal ini dikarenakan setiap kegiatan pemberdayaan terlebih dahulu dilaksanakan identifikasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait rencana pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan agar setiap stakeholder yang terlibat lebih efektif dan tepat sasaran.

**6. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir**

Realisasi jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah 65 UMKM, capaian ini terdiri dari 55 UMKM yang terfasilitasi kemitraan usaha dan investasi dan 3 pelaku usaha yang difasilitasi pelayanan usaha dan invesrasinya dan 2 pelaku usaha yang dibina melalui startup. Nilai persentase capaian ini setara dengan 108,33% dari target triwulan II atau jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 125 UMKM maka persentasenya sebesar 52%.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp526.037.604,- atau setara dengan 30,93% dari total pagu sebesar Rp1.701.000.000,-. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 52% daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 30,93%.

**7. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan**

Capaian indikator kinerja ini terdiri dari tenaga kerja yang dihitung adalah setiap tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi ataupun tenaga kerja yang tidak langsung pada proses produksi pada masing-masing usaha mikro kecil dan menengah sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan fasilitasi sosialisasi dan pembinaan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Realisasi yang telah dihitung oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar 3.827 orang tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung atau setara dengan 106,60% dari target triwulan II sebanyak 3.590 orang, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebanyak 10.770 orang maka persentase capaian sebesar 35,53%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan  
Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN